



.....

2025

.....

.....

LAPORAN ANALISIS STUASI PROGRAM STUNTING DI KABUPATEN PASURUAN

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN
PASURUAN**

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Analisis Situasi Program Stunting Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah manifestasi akuntabilitas publik dan rekaman sejarah atas ikhtiar kolektif kita dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman gagal tumbuh.

Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat monumental bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Di tengah tantangan global dan dinamika daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil membuktikan bahwa dengan komitmen politik yang kuat, strategi teknokratik yang terukur, dan eksekusi lapangan yang disiplin, target-target pembangunan yang tampak mustahil dapat kita lampau.

Berdasarkan hasil pengukuran dan publikasi data *stunting* periode akhir tahun 2025, Kabupaten Pasuruan mencatatkan capaian yang luar biasa. Prevalensi *stunting* berdasarkan data *by name by address* (E-PPGBM) berhasil ditekan hingga ke angka 3,91%. Angka ini merupakan rekor terendah dalam sejarah daerah kita, sekaligus menempatkan Kabupaten Pasuruan jauh melampaui target nasional. Capaian ini mengindikasikan bahwa mayoritas mutlak balita di Kabupaten Pasuruan kini tumbuh dengan status gizi optimal, siap menjadi modal dasar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Keberhasilan menekan angka *stunting* hingga di bawah 4% ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah buah dari orkestrasi kebijakan yang harmonis melalui 8 Aksi Konvergensi. Transformasi paradigma anggaran yang menyeimbangkan intervensi spesifik (kesehatan) dan intervensi sensitif (lingkungan/sanitasi), dukungan fiskal sebesar Rp 7,1 Miliar, serta militansi Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lini terbawah, menjadi kunci kemenangan kita dalam perang melawan *stunting*. Kita telah berhasil memastikan bahwa layanan kesehatan mulai dari Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil, hingga Balita terdistribusi dengan cakupan yang nyaris sempurna (*Universal Coverage*).

Kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan, serta seluruh Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha,

media, dan masyarakat madani, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kerja keras, dedikasi, dan sinergitas Bapak/Ibu sekalian adalah fondasi utama dari prestasi ini.

Akhir kata, capaian 3,91% ini bukanlah garis finis, melainkan standar baru yang harus kita jaga. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan (*sustainability*) agar tidak terjadi kenaikan kasus kembali. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan referensi strategis bagi perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang dan Urgensi Program	1
1.2.Dasar Hukum	5
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sasaran Program	8
1.5.Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	13
2.1.Posisi dan Peran Strategis Daerah	13
2.2.Potensi Sumber Daya Daerah.....	15
A.Topografi.....	15
B.Geologi dan Jenis Tanah	19
C.Klimatologi.....	25
D.Penggunaan Lahan	25
E.Potensi Pengembangan Wilayah	27
2.3.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	36
A.Daya Dukung Air	36
B.Daya Dukung Pangan	38
2.4.Ketahanan Energi	39
2.5.Lingkungan Hidup Berkualitas.....	41
2.6.Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim.....	44

2.7.Demografi.....	52
A.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	52
B.Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	54
C.Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan.....	57
D.Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan.....	62
E.Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan	64
F.Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut ..	66
G.Proyeksi Demografi.....	68
2.8.Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	73
A.Laju Pertumbuhan Ekonomi	73
B.Indeks/Rasio Gini	76
C.Angka Kemiskinan.....	77
D.Tingkat Pengangguran Terbuka	80
E.PDRB Perkapita	82
F.Indeks Pembangunan Manusia.....	83
BAB III ANALISIS SITUASI PREVALENSI DAN SEBARAN STUNTING.....	87
3.1.Perkembangan Prevalensi Stunting	87
A.Dinamika Fluktuasi Tren Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia	87
B.Konsistensi Penurunan Sistematis Berdasarkan Data E-PPGBM.....	90
C.Analisis Disparitas Data (Komparasi SSGI vs E-PPGBM)	92
3.2.Analisis Capaian Remaja Putri.....	94
A.Dinamika Distribusi dan Kepatuhan Konsumsi TTD	95
B.Cakupan Skrining Anemia (Pemeriksaan Hemoglobin).....	96
3.3.Analisis Capaian Calon Pengantin	97
A.Kinerja Layanan Edukasi dan Bimbingan Perkawinan	98
B.Fenomena Eskalasi Kinerja Pendampingan TPK dan Skrining Kesehatan ..	98

3.4. Analisis Capaian Ibu Hamil	100
A. Pemetaan Risiko Gizi dan Intervensi pada Ibu Hamil KEK.....	101
B. Kepatuhan Standar Pelayanan Antenatal (ANC) dan Suplementasi	102
3.5. Analisis Capaian Ibu Nifas\	103
A. Beban Sasaran dan Jangkauan Layanan Nifas	103
B. Kinerja Strategis Pelayanan KB Pasca Persalinan.....	104
C. Analisis Celah Layanan (Gap Analysis).....	105
3.6. Analisis Capaian Balita.....	105
A. Validitas Data dan Fenomena Penurunan Prevalensi Stunting	106
B. Universal Coverage pada Intervensi Nutrisi Utama (ASI & MP-ASI)	107
C. Mekanisme Perlindungan Kuratif: Intervensi PMT Pemulihan.....	108
BAB IV ANALISIS DUKUNGAN ANGGARAN DAN KEWILAYAHAN	110
4.1. Anggaran Percepatan Penurunan Stunting	110
4.2. Analisis Kewilayahan dan Penetapan Lokus Prioritas Tahun 2026	113
A. Metodologi dan Urgensi Penetapan Lokus	114
B. Peta Sebaran dan Analisis Klasterisasi Wilayah	114
C. Implikasi Strategis dan Arah Kebijakan Anggaran	117
BAB V PENUTUP	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Rekomendasi	119

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	13
2.2	Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya.....	18
2.3	Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	21
2.4	Iklim Kabupaten Pasuruan.....	25
2.5	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	26
2.6	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024	55
2.7	Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024.....	57
2.8	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	59
2.9	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	61
2.10	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	63
2.11	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	64
2.12	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	65
2.13	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	66
2.14	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	67
2.15	Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	68
2.16	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030.....	70
2.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 ..	71
2.18	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024	79
2.19	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	83
2.20	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	84
4.1	Alokasi Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Stunting.....	110
4.2	Sebaran Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.....	116

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan	15
2.2	Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian	17
2.3	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	26
2.4	Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan	35
2.5	Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029	37
2.6	Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	38
2.7	Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	41
2.8	Kualitas Lahan dan Indeks LH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	42
2.9	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	48
2.10	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	50
2.11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2020-2024	52
2.12	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	53
2.13	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	56
2.14	Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	75
2.15	Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..	77
2.16	Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	79
2.17	TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	81
2.18	IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	86
3.1	Hasil Survei Status Gizi Indonesia	89
3.2	E-PPGBM Bulan Agustus	91
3.3	Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2019-2025	92
3.4	Perbandingan SSGI dan E-PPGBM.....	94
3.5	Grafik Kepatuhan Konsumsi TTD Rematri Semester I dan II.....	96
3.6	Jumlah Intervensi Sasaran Calon Pengantin	97
3.7	Jumlah Intervensi Sasaran Ibu Hamil	100
3.8	Jumlah Capaian Balita	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Program

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya multidimensi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata. Dalam kerangka besar visi Indonesia Emas 2045, pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menempati posisi sentral sebagai pilar utama, menggeser paradigma lama yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan fisik semata. Kualitas manusia menjadi kunci determinan daya saing suatu bangsa, khususnya dalam menghadapi era bonus demografi dan persaingan global yang semakin kompetitif. Dalam konteks regional Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan memegang peranan yang sangat vital dan strategis sebagai salah satu penyangga utama perekonomian daerah.

Ditinjau dari perspektif geo-ekonomi dan kewilayahan, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Keunggulan komparatif lokasi ini terbentuk secara alamiah karena keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menjadi *hub* atau penghubung utama bagi tiga koridor pembangunan strategis di Jawa Timur. Ketiga koridor tersebut meliputi koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali yang merupakan pintu gerbang arus logistik ke wilayah timur Indonesia; koridor Surabaya - Malang sebagai pusat aglomerasi ekonomi perkotaan dan jasa; serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali yang mendukung konektivitas sektor pariwisata dan distribusi barang. Posisi ini menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai "jantung" sirkulasi ekonomi regional yang tidak terelakkan.

Konektivitas wilayah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini semakin diperkuat secara masif dengan adanya dukungan berbagai moda transportasi, khususnya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute strategis Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang. Keberadaan infrastruktur rel ini memberikan opsi logistik yang efisien dan murah bagi pergerakan barang industri. Nilai strategis wilayah ini kian bertambah signifikan dan mencapai puncaknya dengan adanya akselerasi pembangunan

infrastruktur jalan bebas hambatan (*toll road*) yang terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem Trans Jawa. Jaringan infrastruktur modern ini meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga ruas Pasuruan - Probolinggo. Keberadaan akses tol yang masif dan terinterkoneksi ini secara signifikan memangkas waktu tempuh (*travel time*) dan menekan biaya logistik (*logistics cost*) menuju pusat-pusat ekonomi di Surabaya maupun pelabuhan internasional Tanjung Perak. Transformasi infrastruktur ini secara langsung menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat, kompetitif, dan memiliki daya tarik tinggi bagi pengembangan sektor industri, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Akan tetapi, kemajuan pesat pada sektor infrastruktur fisik dan potensi ekonomi kewilayahan tersebut menghadapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada sebuah tantangan "paradoks pembangunan" yang fundamental. Akselerasi pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti oleh lonjakan kualitas modal manusia yang setara. Hal ini tercermin secara jelas dari indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran komposit kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan analisis data seriat waktu (*time series*) selama lima tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Pasuruan memang menunjukkan tren peningkatan positif yang konsisten. Tercatat, IPM bergerak dari angka 70,2 pada tahun 2020, naik menjadi 70,54 pada tahun 2021, tumbuh ke 71,29 pada tahun 2022, meningkat menjadi 71,91 pada tahun 2023, dan mencapai angka 72,36 pada tahun 2024. Meskipun grafik menunjukkan tren *uptrend*, namun jika dilakukan analisis komparatif (*benchmarking*) secara vertikal maupun horizontal, posisi Kabupaten Pasuruan masih menghadapi ketertinggalan yang cukup lebar (*gap*).

Fakta statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, di saat Kabupaten Pasuruan mencapai angka IPM 72,36, rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur telah bertengger di angka 75,02, dan rata-rata Nasional berada di level yang lebih tinggi yaitu 75,35. Kesenjangan capaian pembangunan manusia ini memberikan sinyal kuat adanya hambatan struktural dalam pemenuhan layanan dasar yang optimal, khususnya pada dimensi kesehatan dan umur panjang serta dimensi pengetahuan. Salah satu akar masalah utama yang menghambat akselerasi IPM dan kualitas SDM tersebut adalah tingginya beban gizi ganda, terutama masalah *stunting* (gagal

tumbuh) pada anak balita. Stunting bukan sekadar isu medis atau postur tubuh yang pendek, melainkan sebuah manifestasi dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berdampak permanen terhadap perkembangan kognitif, motorik, dan produktivitas ekonomi di masa depan.

Dinamika prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan menunjukkan fenomena volatilitas data yang kompleks dan memerlukan kecermatan analisis tingkat tinggi. Jika merujuk pada data historis jangka panjang dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan pernah berada pada level kedaruratan kesehatan masyarakat yang sangat serius. Pada tahun 2013, prevalensi tercatat sebesar 39,6%, angka yang bertahan stagnan di level yang sama (39,6%) hingga tahun 2018. Upaya keras pemerintah daerah baru menunjukkan dampak statistik yang signifikan pada tahun 2023, di mana survei SKI mencatat penurunan prevalensi menjadi 27,9%. Meskipun terjadi penurunan, angka ini secara epidemiologis masih dikategorikan tinggi dan mengindikasikan bahwa masalah stunting belum tuntas sepenuhnya serta masih menjadi ancaman bagi bonus demografi daerah.

Situasi menjadi semakin pelik dan menuntut kewaspadaan tinggi ketika menelaah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Data SSGI memperlihatkan pola tren yang fluktuatif (*volatile*) dan cenderung mengalami divergensi tajam dibandingkan dengan rata-rata Provinsi. Pada tahun 2019, prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 29,30%, posisi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 26,86%. Melalui berbagai intervensi konvergensi, Kabupaten Pasuruan sempat mencatatkan kinerja gemilang pada tahun 2020 dengan penurunan tajam ke angka 21,40%, jauh meninggalkan provinsi yang saat itu stagnan. Stabilitas kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2021 dengan angka 21,50% dan mencapai titik terendah (terbaik) dalam sejarah survei SSGI pada tahun 2022 di angka 20,50%.

Namun, anomali data terjadi pada tahun 2024. Hasil SSGI 2024 menunjukkan adanya lonjakan prevalensi yang sangat signifikan dan mengkhawatirkan di Kabupaten Pasuruan, di mana angka stunting "terlempar" kembali naik menjadi 26,10%. Kenaikan drastis ini sangat kontradiktif dan berbanding terbalik dengan tren

Provinsi Jawa Timur yang pada periode yang sama justru berhasil menekan angka stunting secara drastis hingga menyentuh angka 14,70%. Fenomena divergensi ini menciptakan kesenjangan performa yang ekstrem, di mana Kabupaten Pasuruan tertinggal lebih dari 11 poin persentase dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas sampel survei versus efektivitas intervensi riil di lapangan, mengingat program penanganan stunting di daerah terus berjalan secara intensif.

Di sisi lain, terdapat narasi data yang sangat berbeda dan justru menunjukkan keberhasilan yang konsisten jika ditinjau dari data sensus atau pencatatan rutin. Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), yang bersumber dari pengukuran riil balita *by name by address* di Posyandu, menunjukkan tren penurunan yang linear dan meyakinkan. Berdasarkan data E-PPGBM, prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan menurun secara sistematis dari tahun ke tahun tanpa fluktuasi aneh. Secara berurutan, capaian tercatat sebesar 22,50% pada tahun 2019, menurun menjadi 21,40% pada tahun 2020, dan semakin membaik menjadi 18,10% pada tahun 2021. Akselerasi penurunan stunting semakin tajam pasca pandemi, tercatat 10,80% pada tahun 2022, 7,20% pada tahun 2023, 5,30% pada tahun 2024, dan data mutakhir estimasi tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat rendah yaitu 3,91%.

Disparitas data yang sangat tajam antara hasil survei SSGI 2024 (26,10%) dengan data registrasi E-PPGBM 2025 (3,91%) tidak boleh disikapi secara sederhana. Perbedaan metode antara survei berbasis sampel blok sensus (SSGI) dengan pencatatan rutin sasaran riil (E-PPGBM) mengharuskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memiliki landasan analisis yang kuat. Situasi ini menuntut disusunnya sebuah dokumen Analisis Situasi yang komprehensif, objektif, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Penyusunan Laporan Analisis Situasi Program Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menjadi imperatif teknokratik yang tidak dapat ditawar. Dokumen ini dirancang untuk membedah anatomi permasalahan stunting di Kabupaten Pasuruan, melakukan triangulasi data untuk mendapatkan gambaran yang mendekati kebenaran, serta memetakan faktor determinan spesifik dan sensitif yang paling berpengaruh di setiap wilayah.

Melalui laporan analisis situasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merumuskan strategi penanganan yang presisi, menetapkan lokus prioritas tahun 2026 secara akurat, serta memastikan alokasi sumber daya anggaran yang efektif dan efisien. Laporan ini juga menjadi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting, guna memastikan bahwa keunggulan strategis wilayah dan infrastruktur yang dimiliki Kabupaten Pasuruan dapat diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Kabupaten Pasuruan tidak dilaksanakan dalam ruang hampa, melainkan didasarkan pada kerangka regulasi yang kokoh dan komprehensif. Landasan yudiris ini disusun secara hierarkis, mulai dari tingkat nasional sebagai payung kebijakan makro hingga tingkat daerah sebagai landasan operasional teknis. Keberadaan instrumen hukum ini memberikan legitimasi (keabsahan), kepastian arah kebijakan, pengorganisasian tata kelola, serta akuntabilitas penganggaran dalam seluruh rangkaian intervensi yang dilakukan.

Secara spesifik, kerangka regulasi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Laporan Analisis Situasi serta pelaksanaan intervensi stunting di Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan ke dalam dua klaster utama, yaitu regulasi tingkat nasional dan regulasi tingkat daerah, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini merupakan payung hukum tertinggi yang menetapkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengamanatkan pendekatan konvergensi yang melibatkan multi-pihak dan multi-sektor untuk memastikan target penurunan stunting nasional tercapai. Dokumen ini menjadi rujukan induk bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). Surat Edaran ini menjadi instrumen instruktif terbaru yang memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah

dalam melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi pada tahun berjalan, memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah tetap terjaga secara presisi.

3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan. Peraturan ini menjadi regulasi induk di tingkat kabupaten yang mengatur tata laksana integrasi program lintas Perangkat Daerah, memastikan bahwa penanganan stunting tidak lagi bersifat sektoral melainkan kolaboratif.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera. Regulasi ini merupakan inovasi kebijakan daerah yang menekankan pada pendekatan berbasis gerakan masyarakat (community-based movement), mendorong partisipasi aktif keluarga dalam menciptakan lingkungan yang higienis dan sadar gizi.
5. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 100.3.3.2/548/HK/4242.013/2025 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan Periode 2025-2029. Dokumen ini merupakan landasan legal terbaru yang memformalkan struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk periode lima tahun ke depan, menjamin keberlanjutan estafet penanganan stunting.
6. Surat Keputusan Bupati Pasuruan No. 050/279/Hk/424.013/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.
7. Surat Keputusan Bupati Pasuruan No. 050/280/Hk/424.013/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.
8. Surat Keputusan Bupati Pasuruan No. 050/563/Hk/424.013/2021 Tanggal 9 Juni 2021 Tentang Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Laporan Analisis Situasi Program Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini bukanlah sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan

sebuah langkah strategis fundamental dalam siklus manajemen pembangunan kesehatan daerah. Dokumen ini dirancang dengan kerangka berpikir yang sistematis untuk menjawab tantangan kompleksitas masalah gizi yang bersifat multidimensi.

Maksud utama dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menyediakan landasan teknokratik yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memetakan lanskap permasalahan *stunting* secara utuh. Laporan ini dimaksudkan berfungsi sebagai instrumen diagnostik utama (*primary diagnostic tool*) untuk memotret kondisi aktual kesehatan masyarakat, khususnya terkait status gizi balita, ibu hamil, dan remaja. Lebih dari itu, dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi "peta navigasi" bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasuruan dalam mengonsolidasikan seluruh sumber daya yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah. Dengan adanya analisis situasi ini, dimaksudkan agar seluruh intervensi kebijakan tidak lagi bergerak secara parsial atau berdasarkan intuisi semata, melainkan berpijak pada basis bukti empiris (*evidence-based policy*) yang kuat, sehingga konvergensi program dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran menuju target *zero stunting*.

Secara spesifik dan operasional, penyusunan Laporan Analisis Situasi ini bertujuan untuk mencapai serangkaian luaran strategis sebagai berikut:

1. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi dan memverifikasi besaran masalah *stunting* secara akurat melalui pendekatan triangulasi data. Hal ini meliputi analisis mendalam terhadap sebaran prevalensi *stunting* baik berdasarkan data survei nasional (SSGI/SKI) maupun data pencatatan rutin masyarakat (E-PPGBM). Analisis ini bertujuan untuk membedah tren fluktuasi angka prevalensi dari tahun ke tahun (2019-2025), memahami disparitas data yang terjadi, serta memetakan sebaran kasus hingga ke level mikro (desa/kelurahan). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki satu data tunggal yang valid sebagai basis penentuan derajat kedaruratan masalah di setiap wilayah.
2. Tujuan kedua adalah untuk mengurai benang kusut penyebab terjadinya *stunting* di Kabupaten Pasuruan melalui analisis faktor determinan yang komprehensif. Analisis ini bertujuan untuk tidak hanya melihat gejala klinis, tetapi menggali akar masalah (*root cause analysis*) baik dari sisi intervensi

spesifik (seperti asupan gizi, riwayat penyakit infeksi, dan cakupan layanan kesehatan) maupun intervensi sensitif (seperti akses air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, dan faktor sosial-ekonomi). Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel mana yang memiliki korelasi paling kuat terhadap tingginya angka stunting di suatu wilayah, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan karakteristik masalah lokal (*local specific problem*).

3. Tujuan ketiga adalah untuk melakukan evaluasi kritis terhadap capaian kinerja layanan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah pengampu program. Hal ini mencakup analisis terhadap cakupan layanan esensial bagi kelompok sasaran prioritas (Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil, dan Balita). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) antara target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan, serta menemukan hambatan-hambatan operasional (*bottleneck*) yang menyebabkan layanan tidak terdistribusi secara merata, baik dari sisi suplai (ketersediaan sarana/nakes) maupun sisi permintaan (perilaku/partisipasi masyarakat).
4. Tujuan akhir dan paling krusial dari laporan ini adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, operasional, dan solutif. Berdasarkan hasil analisis situasi, dokumen ini bertujuan untuk memberikan masukan strategis bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya. Termasuk di dalamnya adalah penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus (Lokus) Penanganan Stunting Tahun 2026 yang didasarkan pada kriteria jumlah kasus (beban masalah) dan ketersediaan sumber daya, agar alokasi anggaran dan program dapat difokuskan pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan akselerasi penanganan.

1.4. Sasaran Program

Pelaksanaan analisis situasi dan intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan tidak hanya difokuskan pada kasus yang sudah terjadi, melainkan menerapkan pendekatan komprehensif berbasis siklus hidup (*continuum of care*). Pendekatan ini memandang bahwa upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa pra-konsepsi (sebelum kehamilan) hingga anak berusia 5 tahun, guna memutus mata rantai masalah gizi antar-generasi.

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, sasaran prioritas dalam Laporan Analisis Situasi Program Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 meliputi kelompok populasi strategis sebagai berikut:

1. Kelompok Remaja Putri (Rematri) ditempatkan sebagai sasaran paling hulu dalam strategi pencegahan stunting. Sasaran ini mencakup remaja putri usia sekolah (SMP/SMA sederajat) dan usia subur yang belum menikah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Fokus analisis dan intervensi pada kelompok ini diarahkan pada upaya pencegahan anemia defisiensi besi sejak dini. Hal ini sangat krusial mengingat status kesehatan dan gizi remaja putri saat ini akan sangat menentukan kualitas kesehatan mereka saat kelak menjadi calon ibu. Intervensi kunci yang dipantau meliputi kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) serta skrining kadar Hemoglobin (Hb) untuk memastikan mereka bebas dari anemia sebelum memasuki jenjang pernikahan.
2. Kelompok sasaran Calon Pengantin (Catin) merupakan fase persiapan kritis sebelum terjadinya pembuahan atau masa pra-konsepsi. Sasaran ini meliputi seluruh pasangan yang telah mendaftarkan rencana pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga pencatatan sipil lainnya. Fokus utama pada kelompok ini adalah memastikan kesiapan fisik dan reproduksi calon ibu dan ayah. Analisis situasi pada kelompok ini mencakup cakupan pelaksanaan bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan pranikah, serta pendampingan intensif oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini risiko kesehatan (seperti Kurang Energi Kronis/KEK atau penyakit penyerta) agar dapat ditangani sebelum kehamilan terjadi, sehingga bayi dapat tumbuh dalam rahim yang sehat.
3. Ibu Hamil merupakan sasaran inti dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), di mana pertumbuhan janin sangat bergantung pada asupan gizi dan status kesehatan ibu. Sasaran ini mencakup seluruh ibu hamil yang tercatat di wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan atensi khusus pada ibu hamil yang memiliki risiko tinggi (risti) dan ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK). Analisis pada kelompok ini difokuskan pada kepatuhan pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*/ANC) minimal 6 kali, pemenuhan asupan gizi tambahan, konsumsi TTD, serta pemantauan pertumbuhan janin. Intervensi pada fase ini bersifat determinan mutlak untuk mencegah bayi lahir dengan

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau Panjang Badan Lahir Rendah (PBLR) yang merupakan prediktor utama terjadinya stunting.

4. Kelompok Ibu Pasca Persalinan (masa nifas) hingga menyusui menjadi sasaran penting untuk memastikan keberlangsungan pemberian nutrisi terbaik bagi bayi baru lahir. Fokus analisis pada kelompok ini mencakup keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dukungan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama, serta pemulihan status gizi ibu pasca melahirkan. Selain itu, sasaran ini juga dikaitkan dengan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan. Pengaturan jarak kelahiran (*birth spacing*) melalui KB sangat vital untuk memberikan waktu pemulihan biologis yang cukup bagi ibu sebelum kehamilan berikutnya, sehingga risiko stunting pada anak selanjutnya dapat diminimalisir.
5. Kelompok Balita (bayi di bawah lima tahun) adalah sasaran akhir sekaligus indikator dampak (*outcome*) dari keberhasilan seluruh rangkaian intervensi pencegahan. Sasaran ini mencakup seluruh anak usia 0-59 bulan yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan. Pada kelompok ini, analisis situasi dilakukan secara mendalam untuk memantau pertumbuhan (berat dan tinggi badan) dan perkembangan motorik secara rutin setiap bulan di Posyandu. Fokus utama dibagi menjadi dua sub-kelompok: (1) Bayi usia 0-23 bulan (Baduta) yang berada dalam periode emas pertumbuhan otak yang *irreversible* (tidak dapat diulang), di mana intervensi ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) menjadi kunci; serta (2) Anak usia 24-59 bulan untuk memantau status gizi makro dan pencegahan infeksi berulang. Pada sasaran inilah prevalensi stunting dihitung dan dievaluasi untuk menentukan efektivitas program daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, terstruktur, dan akuntabel mengenai kinerja percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pasuruan pada Semester II Tahun 2025, laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini menguraikan latar belakang urgensi penanganan *stunting* sebagai prioritas daerah, landasan hukum dan regulasi

yang menjadi payung pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, serta sistematika penulisan dokumen. Bab ini menjadi fondasi pemahaman mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menindaklanjuti strategi nasional.

- **BAB II: PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI** Bab ini memaparkan gambaran umum pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang telah dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Deskripsi mencakup mekanisme koordinasi lintas sektor, peran kelembagaan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan, serta inovasi-inovasi manajemen yang diterapkan dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan.
- **BAB III: ANALISIS SITUASI PREVALENSI DAN SEBARAN STUNTING** Bab ini merupakan **inti (core)** dari laporan kinerja, yang menyajikan analisis mendalam (*in-depth analysis*) terhadap capaian indikator intervensi spesifik dan sensitif. Pembahasan dilakukan secara tematik berdasarkan pendekatan siklus hidup (*life-cycle approach*), meliputi:
 - Analisis Tren Prevalensi Stunting (Data E-PPGBM vs SSGI).
 - Analisis Kinerja Layanan Kesehatan Remaja Putri.
 - Analisis Kinerja Layanan Kesehatan Calon Pengantin (Catin).
 - Analisis Kinerja Layanan Kesehatan Ibu Hamil.
 - Analisis Kinerja Layanan Kesehatan Ibu Nifas dan KB.
 - Analisis Kinerja Status Gizi dan Layanan Kesehatan Balita. Pada bab ini, data kuantitatif dibedah untuk melihat efektivitas layanan, kepatuhan sasaran, dan keberhasilan integrasi layanan di fasilitas kesehatan.
- **BAB IV: ANALISIS DUKUNGAN ANGGARAN DAN KEWILAYAHAN** Bab ini membedah dukungan fiskal dan strategi spasial yang diterapkan pemerintah daerah. Analisis mencakup postur realisasi anggaran *stunting* lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), efektivitas belanja (*spending efficiency*), serta perbandingan proporsional antara intervensi spesifik dan sensitif. Selain itu,

bab ini juga memetakan sebaran lokus prioritas dan evaluasi penanganan di wilayah-wilayah dengan prevalensi tinggi.

- **BAB V: PENUTUP** Bab ini merangkum kesimpulan strategis dari seluruh capaian kinerja yang telah dibahas, menyoroti keberhasilan penurunan prevalensi hingga 3,91%, serta mengidentifikasi tantangan yang tersisa. Bagian ini ditutup dengan rekomendasi kebijakan teknokratik untuk rencana tindak lanjut (*way forward*) pada Tahun Anggaran 2026 guna menjamin keberlanjutan program dan mencegah terjadinya kenaikan kasus kembali (*rebound*).

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06

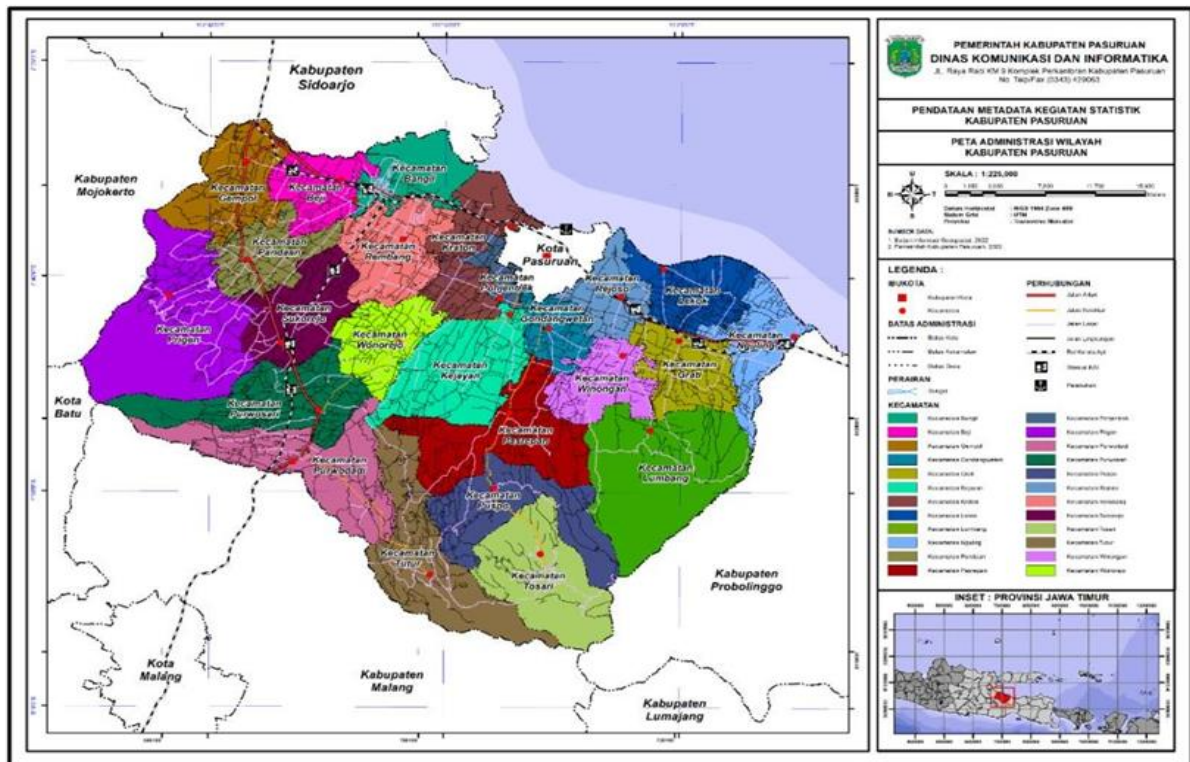
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun

visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Potensi Sumber Daya Daerah

A. Topografi

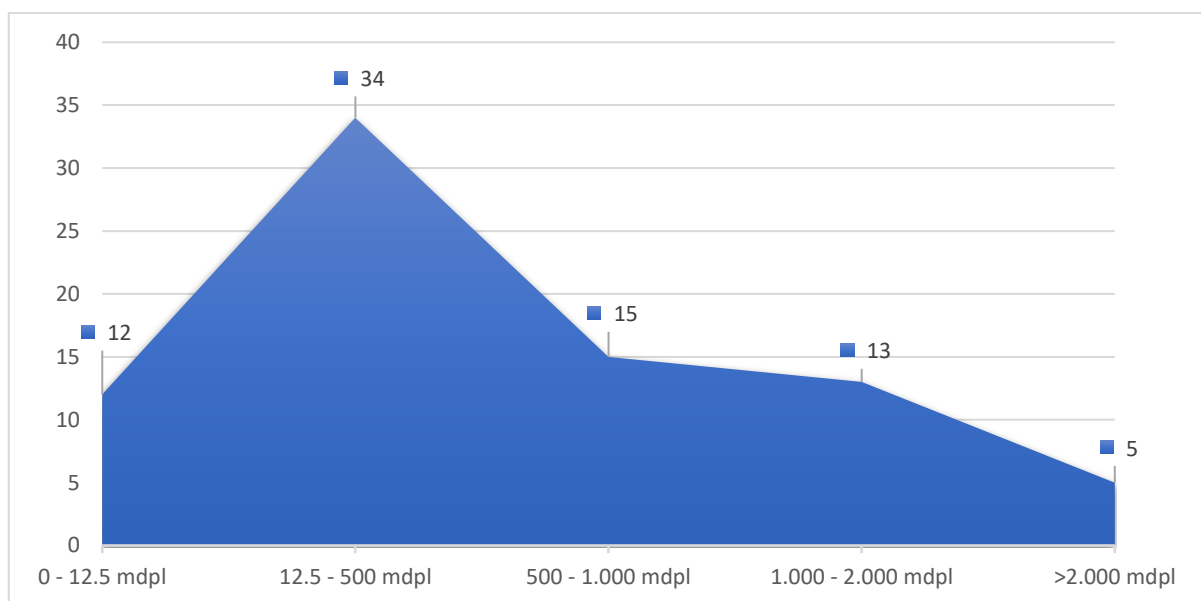
Secara topografis, bentang alam wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi elevasi yang sangat beragam, terentang mulai dari titik terendah di 0 mdpl hingga mencapai puncak tertinggi di 3.313 meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ketinggian ini tercatat secara rinci di setiap wilayah administrasi kecamatan. Karakteristik wilayah ini terbagi secara jelas berdasarkan letak geografisnya; dataran rendah mendominasi kawasan bagian utara, khususnya di sepanjang garis Pesisir Selat Madura, dengan rentang ketinggian antara 0 hingga 290 mdpl. Konsekuensi dari kondisi topografi yang rendah ini menyebabkan kawasan tersebut diidentifikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ancaman bencana banjir.

Sebaliknya, kontur dataran tinggi terpusat pada bagian tenggara yang merupakan bagian dari Kawasan Gunung Bromo, serta di bagian barat daya yang meliputi Kawasan Gunung Welirang. Morfologi kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar ditandai dengan kondisi kelerengan yang terjal atau curam, yang secara alamiah membawa implikasi risiko berupa potensi bencana tanah longsor.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kemiringan lahan atau kelerengan, wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tujuh (7) kategori zona, yaitu sebagai berikut:

1. Zona Kelerengan 0 - 2% (Datar): Wilayah ini meliputi cakupan yang luas, antara lain mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Lekok. Selain itu, zona ini juga mencakup sebagian wilayah dari Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, serta Kecamatan Nguling.
2. Zona Kelerengan 2 - 5% (Landai): Kategori ini tersebar meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.
3. Zona Kelerengan 5 - 8% (Agak Miring): Kawasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Lekok.
4. Zona Kelerengan 8 - 15% (Miring): Wilayah dengan kemiringan ini mencakup sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan, serta Kecamatan Grati.

5. Zona Kelerengan 15 - 25% (Agak Curam): Daerah yang memiliki tingkat kemiringan ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Beji.
6. Zona Kelerengan 25 - 45% (Curam): Kawasan dengan topografi curam ini terdapat pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
7. Zona Kelerengan > 45% (Sangat Curam): Zona dengan kemiringan ekstrem ini meliputi sebagian wilayah di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Prigen.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar tersebut, kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis dan bervariasi apabila ditinjau dari aspek ketinggian lahan atau elevasi. Keragaman bentang alam ini menjadi dasar fundamental dalam pemetaan karakteristik geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada perbedaan elevasi yang ada, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan secara spesifik ke

dalam 5 (lima) kategori atau jenis wilayah. Rincian sistematis mengenai kelima klasifikasi wilayah tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819,04	Kawasan pengembang- an usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah Dataran	12,5 - 500	50.384,02	Kawasan pengemb- angan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 - 1.000	21.877,17	Kawasan untuk tanaman keras/tahuna n dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
				air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring	Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000 - 2.000	18.615,08	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan Pegunungan Tinggi	>2.000	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, karakteristik litologi wilayah bagian selatan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari bentang alam Pegunungan Malang Selatan yang secara dominan tersusun oleh struktur batuan vulkanik. Pembentukan formasi

batuan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme gunung berapi yang terjadi pada masa lampau (paleovolcanism). Material penyusun kawasan ini mencakup variasi jenis batuan beku dan piroklastik, seperti andesit, basalt, serta batuan piroklastik lainnya. Keberadaan gunung-gunung api strato yang menjulang tinggi, khususnya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, menjadi bukti nyata sekaligus sumber material utama dari deposit batuan vulkanik yang tersebar luas di wilayah selatan ini.

Sementara itu, pada sisi bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan, kondisi geologinya didominasi oleh hamparan batuan sedimen. Jenis batuan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang kompleks, meliputi endapan sungai (fluvial), bentukan delta, hingga sedimen laut (marine sediment). Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh dinamika geologis seperti mekanisme pengendapan material, sedimentasi berkelanjutan, serta aktivitas tektonik. Jaringan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan berperan vital dalam transportasi material endapan yang tererosi dari kawasan pegunungan dan perbukitan di sekitarnya menuju ke dataran yang lebih rendah. Akibat proses ini, pada kawasan dataran rendah terbentuk lapisan endapan alluvial yang sangat subur dan kaya akan kandungan bahan organik, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi kesuburan tanah untuk mendukung sektor pertanian yang makmur di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, posisi geografis Wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam zona yang tergolong aktif secara tektonik. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalur-jalur patahan (sesar) dan rekahan geologi yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Aktivitas tektonik yang berlangsung dalam kurun waktu geologis tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konfigurasi relief permukaan bumi serta pola aliran sungai (drainase) yang ada saat ini. Di samping itu, beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan juga teridentifikasi memiliki kandungan deposit batu gamping (batu kapur). Batuan ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi laut purba dan kini menjadi salah satu sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis tinggi, khususnya sebagai bahan baku utama untuk mendukung industri konstruksi dan bahan bangunan.

Ditinjau dari perspektif struktur geologi secara makro, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi secara proporsional ke dalam dua kelompok formasi geologi besar. Kelompok pertama adalah formasi gunung api kuartir muda (young quaternary) yang

mendominasi wilayah dengan cakupan luasan mencapai 52,43%, sedangkan kelompok kedua adalah formasi kuartar tua (old quaternary) yang mencakup luasan sebesar 34,95%. Secara lebih spesifik, kondisi geologi wilayah ini tersusun atas dua belas (12) satuan batuan yang meliputi: Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartar atas Penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api Arjuno-Welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartar tengah Ringgit (Qvr), serta Satuan gunung api kuartar Tengger tua (Qpvtr).

Secara garis besar, klasifikasi jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: kelompok batuan permukaan, kelompok batuan sedimen, dan kelompok batuan gunung api. Rincian penjelasan teknis mengenai karakteristik masing-masing jenis batuan tersebut telah disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur 2. Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan 2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
	2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	1. Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	1. Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna - Welirang	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
Batuan Gunung Api Bromo	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar 2. Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung 2. Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kompleksitas proses geologi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang di wilayah Kabupaten Pasuruan telah meninggalkan jejak yang signifikan. Fenomena ini membentuk banyak rekaman peristiwa geologi yang unik dan menarik, yang memiliki nilai ilmiah serta estetika tinggi. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola dan ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geological Heritage). Langkah pelestarian

ini menjadi sangat krusial agar keberadaan situs-situs geologi tersebut tetap terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan, sekaligus mendorong pengakuan status Warisan Geologi tersebut tidak hanya pada tingkat Nasional, tetapi juga menembus pengakuan di tingkat Internasional.

Lebih lanjut, beralih pada aspek pedologi atau karakteristik tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki variasi jenis tanah yang cukup beragam. Berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya, jenis tanah di wilayah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok utama. Identifikasi ini penting untuk menentukan daya dukung lahan terhadap berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian. Berikut adalah rincian keenam kelompok tanah tersebut:

1. Tanah Alluvial Jenis tanah ini memiliki karakteristik fisik berupa warna dominan kelabu dengan tekstur liat. Tingkat keasaman tanah ini bervariasi (aneka), namun memiliki kandungan zat organik yang tergolong lemah. Meskipun demikian, tingkat kejenuhan biasanya berkisar antara sedang hingga tinggi. Dari sisi hidrologi, tanah Alluvial memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun kepekaan terhadap erosi tergolong tinggi, namun karena sebarannya mayoritas berada di daerah yang datar, risiko erosi lanjut tidak terjadi secara signifikan. Pemanfaatan: Lahan dengan jenis tanah ini sangat cocok dan umum digunakan untuk budidaya padi sawah, tanaman palawija, serta kegiatan perikanan darat.
2. Tanah Regosol Tanah Regosol dicirikan dengan warna yang bervariasi dari kelabu hingga kuning dengan tekstur yang kasar atau berpasir. Kandungan liat pada tanah ini relatif sedikit, yakni kurang dari 40%. Sifat kimianya menunjukkan keasaman dan kejenuhan basa yang beraneka ragam, serta kandungan zat organik yang rendah. Tanah ini memiliki permeabilitas atau kemampuan meloloskan air yang tinggi, serta memiliki kepekaan yang tinggi pula terhadap erosi. Pemanfaatan: Jenis tanah ini mendukung untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, tanaman palawija, perkebunan tebu, serta budidaya berbagai jenis sayuran.
3. Tanah Andosol Tanah yang umumnya terbentuk dari material vulkanik ini memiliki ciri khas warna hitam hingga kuning. Teksturnya berkisar dari lempung hingga debu, dengan kandungan liat yang cenderung menurun. Derajat

keasamannya berada pada rentang agak masam hingga netral, dengan kandungan zat organik yang lemah dan kejenuhan basa. Sifat fisiknya memiliki permeabilitas sedang, namun perlu diwaspadai karena memiliki kepekaan yang besar terhadap ancaman erosi. Pemanfaatan: Lahan Andosol sangat produktif untuk komoditas dataran tinggi seperti sayur-mayur, tanaman bunga-bunga, perkebunan teh, kopi, serta pengembangan hutan pinus.

4. Tanah Grumusol Karakteristik fisik tanah Grumusol ditandai dengan warna kelabu hingga hitam pekat. Tekstur tanah ini didominasi oleh liat, di mana kandungan liatnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman tanah. Secara kimiawi, tanah ini memiliki reaksi sedikit asam hingga alkalin (basa), dengan kadar zat organik yang rendah namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Permeabilitas tanah ini rendah, yang menyebabkan air sulit meresap, dan memiliki kepekaan erosi yang besar. Pemanfaatan: Tanah ini dimanfaatkan secara luas untuk pertanian padi sawah, tanaman jagung, kedelai, tebu, kapas, serta sangat cocok untuk pertumbuhan hutan jati.
5. Tanah Mediteran Tanah Mediteran mudah dikenali dari warnanya yang kuning hingga merah. Tekstur tanah ini adalah lempung liat dengan tingkat keasaman mulai dari agak masam hingga netral. Kandungan zat organik di dalamnya tergolong rendah, namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Sifat permeabilitasnya sedang, sementara kepekaan terhadap erosi berkisar dari besar hingga sedang, tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan: Potensi lahan ini umumnya digunakan untuk areal persawahan (padi sawah), lahan tegalan, serta area pertumbuhan rumput untuk pakan ternak.
6. Tanah Latosol Jenis tanah ini memiliki warna khas merah hingga kuning dengan tekstur liat yang konsisten dari lapisan atas hingga ke bawah. Tingkat keasamannya berkisar dari masam hingga agak masam. Kandungan zat organiknya bervariasi dari rendah hingga agak sedang di lapisan permukaan (top soil) dan menurun pada lapisan yang lebih dalam. Kejenuhan basanya rendah hingga sedang, namun memiliki permeabilitas yang tinggi dan keunggulan berupa kepekaan erosi yang kecil, sehingga relatif stabil. Pemanfaatan: Tanah Latosol sangat mendukung berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, meliputi padi sawah, jagung, tanaman umbi-

umbian, kelapa, coklat (kakao), cengkeh, kopi, maupun sebagai area hutan tropika.

C. Klimatologi

Secara klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum dikategorikan memiliki tipe iklim tropis basah. Kondisi cuaca dan iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi udara regional, khususnya hembusan angin Muson yang bertiup secara periodik. Keberadaan angin Muson ini memegang peranan vital dalam membentuk pola iklim wilayah serta menentukan siklus pergantian musim. Fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme musim, yakni musim penghujan yang ditandai dengan aktivitas angin Muson Timur, serta musim kemarau yang terjadi akibat pengaruh hembusan angin Muson Barat. Adapun gambaran spesifik mengenai data dan kondisi iklim aktual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sepanjang Tahun 2024, disajikan secara terperinci dalam Tabel berikut.

Tabel 2.4 Iklim Kabupaten Pasuruan

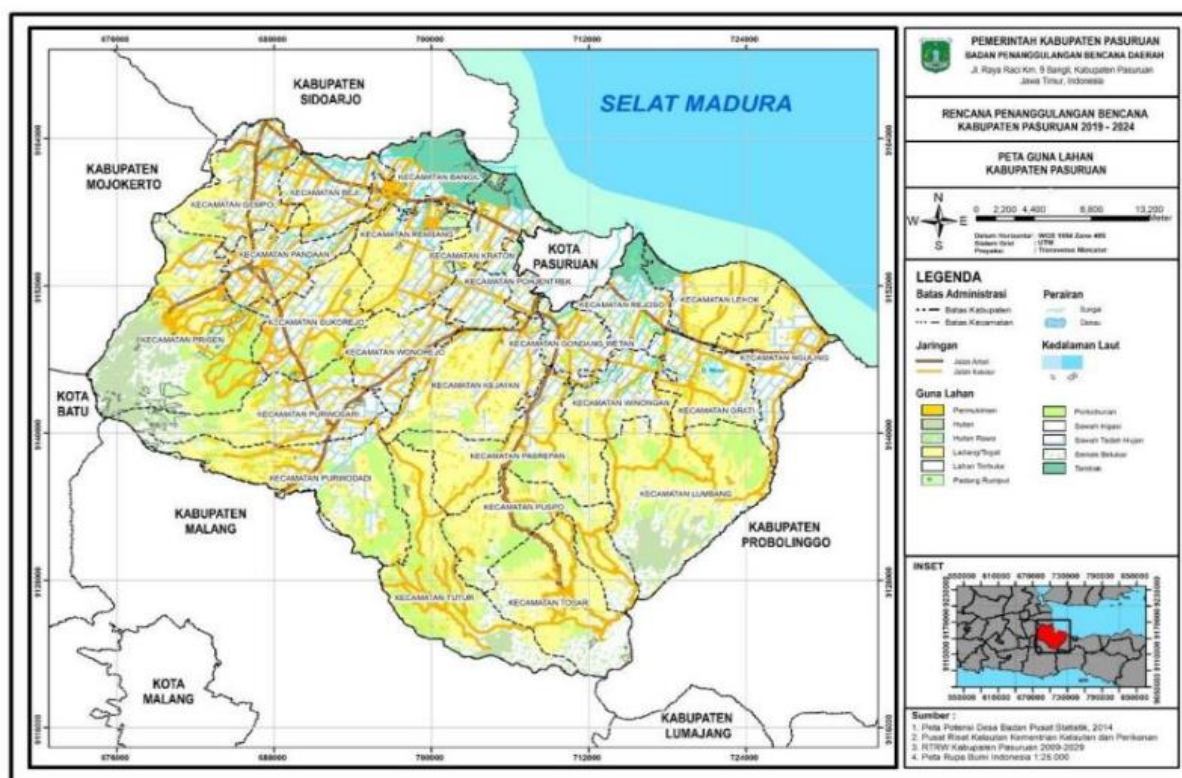
Kecepatan Angin	Maks 13 Knots terjadi di bulan Maret dan April
Rata-rata Kelembapan Maksimum	91% di bulan Februari dan Desember
Hari Hujan	Terbanyak selama 25 hari di bulan Maret dan Desember
Rata-rata Penyinaran Matahari	Paling lama 6,3 jam di bulan Agustus
Curah Hujan	Maks 736,1 mm/tahun terjadi di bulan Desember
Rata-rata Suhu Tertinggi	Mencapai 24,5 C terjadi di bulan Oktober

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari aspek tata guna lahan, pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dominasi yang signifikan pada sektor pertanian. Hal ini

terindikasi dari penggunaan lahan terbesar yang dialokasikan untuk areal persawahan dengan sistem irigasi, yang mencatatkan total luasan mencapai 38.391,34 Hektar. Di sisi lain, proporsi lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun yang meliputi permukiman, kawasan industri, dan fasilitas infrastruktur lainnya tercatat seluas 17.301,60 Hektar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan komposisi peruntukan lahan lainnya, rincian data secara mendetail telah diuraikan dalam Tabel berikut:



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Presentase
1	Aneka Industri	0,994
2	Industri Kecil	0,023
3	Jasa Permukiman	10,169
4	Peternakan Unggas	0,021
5	Tambak	1,696
6	Sawah Irigasi	26,187
7	Sawah Tadah Hujan	1,536
8	Buah-Buahan	0,006

No	Penggunaan	Presentase
9	Kebun Campuran	3,242
10	Perkebunan	2,805
11	Tegalan/Ladang	36,051
12	Hutan Sejenis	11,878
13	Padang Rumput	0,707
14	Semak	2,708
15	Kolam Air Tawar	0,001
16	Lapangan Olahraga	0,215
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033
18	Tanah Terbuka	1,224
19	Sungai	0,217
20	Danau/Situ/Telaga	0,127
21	Jalan Aspal	0,081
22	Pemakaman	0,081

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan, 2024

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara ekonomis, Kabupaten Pasuruan dianugerahi berbagai keunggulan komparatif maupun kompetitif yang menjadi potensi daerah yang sangat strategis. Apabila seluruh potensi tersebut dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan manajemen yang tepat, maka hal tersebut akan menjadi katalisator utama dalam mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah secara signifikan. Salah satu pilar utama yang menjadi keunggulan tersebut adalah:

1. Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi, yang telah menghubungkan hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pasuruan, menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah. Aksesibilitas yang tinggi ini memberikan dukungan yang sangat vital bagi akselerasi perkembangan di berbagai sektor strategis, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan destinasi pariwisata, produktivitas pertanian, kemajuan sektor industri, serta kelancaran transportasi. Lebih jauh lagi, konektivitas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas.

Selain mengandalkan prasarana jalan raya, sistem transportasi logistik barang dan mobilitas jasa juga diperkuat dengan dukungan moda transportasi berbasis rel. Jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi sarana pendukung yang efisien, dengan melayani dua koridor utama yang strategis, yakni jurusan selatan (Surabaya - Bangil - Malang - Blitar) dan jurusan timur (Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi).

Sebagai daerah yang memiliki basis perekonomian kuat pada sektor pertanian dan industri, Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan sistem jaringan irigasi teknis yang handal. Infrastruktur ini berfungsi krusial dalam mendukung produktivitas lahan pertanian serta kebutuhan air baku bagi kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang tersedia dirancang untuk mampu mengairi lahan pertanian secara memadai, yang pengelolaannya dioptimalkan melalui mekanisme pengelolaan irigasi partisipatif guna menjamin keberlanjutan pasokan air.

Sementara itu, dari sisi pengembangan investasi, ketersediaan Kawasan Industri yang terpadu menjadi nilai tambah tersendiri. Kawasan ini telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang komprehensif, termasuk fasilitas pengelolaan limbah yang berstandar serta fasilitas penunjang lainnya. Keunggulan kawasan ini semakin nyata dengan adanya konektivitas langsung (aksesibilitas) menuju jaringan jalan tol yang menghubungkan arah Surabaya - Malang hingga Banyuwangi/Bali, yang menjamin efisiensi logistik.

Tidak hanya itu, ketersediaan komponen infrastruktur utilitas dasar lainnya juga telah terpenuhi dalam jumlah yang cukup memadai, meliputi ketersediaan air bersih, suplai energi listrik yang stabil, jaringan pipa gas untuk industri, serta infrastruktur telekomunikasi yang modern. Dengan demikian, ekosistem infrastruktur yang telah terbangun secara menyeluruh ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menunjang perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan."

2. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan menyimpan kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam dan bernilai tinggi, mencakup berbagai spektrum mulai dari keindahan alam, kekayaan sejarah, hingga inovasi wisata buatan dan agrowisata. Salah satu daya tarik utama yang menjadi primadona dan telah

diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo. Destinasi ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menawarkan panorama matahari terbit yang ikonik serta pemandangan kaldera yang spektakuler.

Selain pesona Bromo, Kabupaten Pasuruan juga dianugerahi berbagai wisata alam lainnya yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Wisata berbasis perairan dan air terjun menjadi unggulan, meliputi Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru yang legendaris, keindahan Danau Ranu Grati, serta kejernihan Sumber Air Umbulan. Deretan air terjun eksotis lainnya yang patut dikunjungi antara lain Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, hingga Air Terjun Coban Waru. Tidak hanya di dataran tinggi, potensi wisata bahari dan pesisir juga tersedia, seperti Pantai Pasir Panjang di Kecamatan Lekok, serta ekosistem Hutan Mangrove yang asri di Pantai Penunggul (Kecamatan Nguling), Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Kraton.

Dari aspek sejarah dan spiritualitas, Kabupaten Pasuruan kaya akan situs wisata budaya dan religi yang menjadi saksi perjalanan peradaban masa lampau. Peninggalan masa klasik Hindu-Buddha dapat ditemukan pada situs Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, serta situs Dewa Wisata Purbakala Tambak Sari. Jejak sejarah perjuangan juga terekam di Goa Jepang/Inna Tretes. Sementara itu, wisata religi Islam atau ziarah makam leluhur meliputi Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, dan Makam Mbah Segoropuro. Bagi para pencari ketenangan spiritual, terdapat pula lokasi pertapaan seperti Pertapaan Abiyoso dan Pertapaan Indrokilo.

Melengkapi keindahan alam dan budaya, sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan Wisata Buatan yang menawarkan alternatif rekreasi modern dan pengalaman baru bagi wisatawan keluarga. Beberapa destinasi unggulan dalam kategori ini antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park.

Sektor pertanian yang subur di Kabupaten Pasuruan juga diintegrasikan menjadi daya tarik Wisata Agro yang edukatif dan rekreatif. Destinasi ini tersebar luas, meliputi Agrowisata Apel, Agro Kopi, serta Agro Bunga Krisan dan Paprika yang terpusat di Kecamatan Tutar. Selain itu, terdapat pula sentra Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutar dan Kecamatan Grati, budidaya Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, serta sentra Agro Durian yang dapat ditemui di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tutar, dan Puspo. Destinasi agrowisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi meliputi Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutar, wisata sejarah industri Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, perkebunan Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Sukorejo, wisata edukasi Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, serta hamparan harum Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Terakhir, Kabupaten Pasuruan juga memfasilitasi segmen Wisata Minat Khusus yang menawarkan pengalaman eksklusif dan petualangan. Destinasi yang masuk dalam kategori ini antara lain Taman Safari Indonesia II yang terkenal sebagai konservasi satwa, kawasan elit Taman Dayu, fasilitas olahraga golf di Finna Golf & Country Club, kawasan wisata Kaliandra, Bukit Flora, serta area berkemah di Baung Camp. Pengembangan pariwisata ini juga diperkuat dengan keberadaan Desa Wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-desa wisata ini tersebar strategis di berbagai kecamatan, yaitu di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutar, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Winongan.

3. Potensi Industri

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Pasuruan, dengan spektrum yang luas meliputi industri skala besar, menengah, hingga industri kecil. Persebaran industri besar terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis yang didukung oleh aksesibilitas yang baik, yakni meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Kejayan. Sementara itu, industri kecil dan menengah (IKM) tumbuh

subur dan menjadi penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Sektor IKM ini bergerak dalam berbagai bidang yang variatif, antara lain industri makanan dan minuman, kerajinan bordir, tekstil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), konveksi, meubel kayu, serta kerajinan logam.

Dalam peta industri kreatif daerah, salah satu sektor unggulan yang telah memiliki reputasi kuat adalah kerajinan bordir, konveksi, dan batik. Kecamatan Bangil telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan bordir dengan keunggulan kompetitif pada desain yang inovatif dan kualitas yang prima. Tingginya permintaan pasar yang sering kali melebihi kapasitas produksi di Bangil memicu terbentuknya jejaring produksi yang meluas ke kecamatan penyangga lainnya, seperti Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, dan Winongan. Jangkauan pemasaran produk bordir ini tidak hanya mendominasi pasar lokal, tetapi juga sukses menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, hingga kawasan Timur Tengah. Di sektor lain, industri konveksi berkembang pesat di Kecamatan Gempol dengan spesialisasi produk berupa celana jeans, kaos, dan celana olahraga (sport). Tidak ketinggalan, industri batik pewarna alam juga menunjukkan eksistensinya yang semakin diakui oleh konsumen mancanegara, dengan pasar ekspor mencakup Korea, Malaysia, dan Australia.

Potensi sumber daya alam juga mendorong berkembangnya sentra industri kayu dan meubel. Sentra-sentra ini tersebar di berbagai titik, antara lain di Desa Sentul (Kecamatan Purwodadi), Desa Tambaksari (Kecamatan Kraton), Desa Wonorejo (Kecamatan Wonorejo), Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan (Kecamatan Pohjentrek), serta wilayah Kecamatan Winongan dan Rejos. Para pengrajin di wilayah ini sangat kreatif dalam menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, mulai dari mainan edukatif anak-anak, aksesoris otomotif (setir mobil, handle persneling, dashboard), kotak tisu, papan catur, hingga produk furnitur atau meubel. Pemasaran produk berbasis kayu ini telah menjangkau pasar domestik hingga internasional.

Selain kayu, Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra kerajinan logam mulia, khususnya perak, yang berpusat di Kecamatan Bangil dan Gempol. Karya pengrajin perak ini telah berhasil menembus pasar global, termasuk ekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Di sisi lain, industri

pendukung otomotif berupa industri kecil spare part kendaraan bermotor tumbuh berkembang di Kecamatan Winongan, dengan distribusi pasar utama menyuplai kebutuhan di kota besar seperti Malang dan Surabaya.

Untuk mendukung iklim investasi, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri terpadu, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Sebagai kawasan berikat, PIER menawarkan lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan menjanjikan bagi para investor. Selain PIER, pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan kawasan peruntukan industri di luar area tersebut yang membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan industri baru di masa depan.

Sektor industri kecil makanan dan minuman (mamin) yang berbasis bahan baku lokal juga menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat di seluruh kecamatan. Salah satu ikon kuliner, yaitu sentra Pia di Kecamatan Gempol, terus berkembang dan menjadi sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan pemasaran yang meluas ke Malang dan Surabaya. Potensi agroindustri juga dimanfaatkan dengan baik, seperti industri olahan apel, kopi, dan susu yang tumbuh di Kecamatan Tukur; serta industri aneka keripik yang tersebar di Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari, dan Purwodadi. Di wilayah pesisir, industri pengolahan hasil perikanan berkembang di Kecamatan Rejos, Lekok, Grati, Bangil, dan Beji. Terdapat pula produk unik seperti minuman herbal Pokak di Kecamatan Winongan serta olahan sirup dan dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri potensial ini memberikan optimisme dan harapan baru bagi penguatan ekonomi sektor riil daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Keberlanjutan industri kecil menengah ini juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur pemasaran yang strategis, seperti Kawasan Wisata Masjid Cheng Hoo, Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, kawasan Taman Dayu, serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol yang berfungsi sebagai etalase produk-produk lokal.

4. Potensi Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di

Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2025, wilayah ini memiliki bentang alam yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan secara terintegrasi dan berkualitas tinggi.

Keanekaragaman Sektor Pertanian dan Perkebunan Di sektor pertanian, Kabupaten Pasuruan memproduksi berbagai komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Purwodadi, Wonorejo, hingga Grati.

Kekuatan utama lainnya terletak pada sektor hortikultura yang terbagi berdasarkan topografi wilayah. Wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Tuter, Puspo, dan Tosari menjadi sentra sayuran dan buah subtropis, menghasilkan kentang, paprika, wortel, kubis, serta buah-buahan premium seperti apel dan stroberi. Sementara itu, wilayah dataran rendah dan menengah dikenal sebagai penghasil buah tropis unggulan, khususnya Mangga Gadung Klonal 21 dan Mangga Garifta, serta Alpukat, Pisang Cavendish, Durian, dan Jeruk. Tak hanya buah dan sayur, florikultura juga berkembang pesat dengan komoditas tanaman hias, Anggrek, Krisan, dan Bunga Sedap Malam yang banyak ditemui di wilayah Prigen, Rembang, dan Bangil.

Sektor perkebunan komersial didukung oleh komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tebu menjadi tanaman yang dominan di banyak kecamatan, disusul oleh Kopi dan Cengkeh yang tumbuh subur di lereng pegunungan, serta komoditas lain seperti Kapuk, Tembakau, dan Kelapa.

Sentra Peternakan yang Produktif Kabupaten Pasuruan juga dikenal sebagai sentra peternakan yang vital. Populasi ternak tersebar merata dengan spesialisasi tertentu. Komoditas sapi potong dan unggas (ayam buras, petelur, pedaging, itik) dapat ditemukan di hampir seluruh kecamatan. Namun, yang menjadi ciri khas adalah peternakan Sapi Perah. Wilayah seperti Tuter, Puspo, Purwodadi, Grati, dan Lekok menjadi pusat produksi susu segar yang signifikan. Selain itu, ternak kecil seperti kambing, domba, dan kelinci juga dikembangkan secara luas oleh masyarakat sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

Kekayaan Sektor Perikanan: Dari Kolam hingga Laut Potensi perikanan di Kabupaten Pasuruan melengkapi kekayaan agrarisnya. Sektor ini terbagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di empat kecamatan dataran tinggi (Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang) yang memang difokuskan untuk agrikultur pegunungan.

Di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, dan Nguling sektor perikanan sangat dominan dengan hasil laut dan tambak. Perikanan tangkap menghasilkan tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap, kepiting, dan udang. Sementara itu, budidaya tambak (air payau) di wilayah ini memproduksi Bandeng, Udang (Windu, Vanamei), dan Rumput Laut dalam jumlah besar.

Untuk wilayah daratan (non-pesisir), budidaya perikanan air tawar berkembang pesat melalui metode kolam. Komoditas utamanya meliputi Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, dan Patin. Keunikan tersendiri terdapat di Kecamatan Grati, yang selain memiliki potensi laut, juga mengembangkan budidaya sistem Jaring Apung (kemungkinan besar di Ranu Grati) dengan komoditas seperti Nila, Tombro, dan Gurami.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan ekosistem ekonomi yang kuat dengan pembagian zonasi komoditas yang jelas antara wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir.

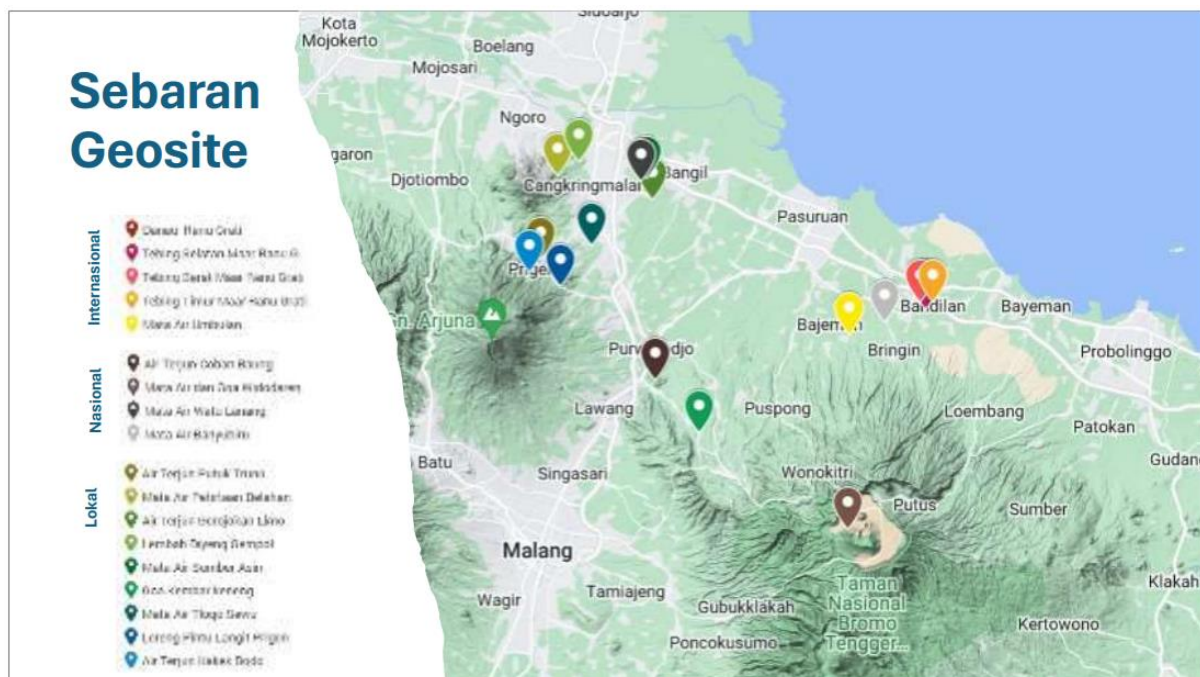
5. Potensi Keragaman Geologi

Berdasarkan pelaksanaan kajian mendalam mengenai Geoheritage (warisan geologi) yang dilakukan pada Tahun 2024, telah berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai bentuk keragaman geologi (geodiversity) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Temuan ini menunjukkan kekayaan fenomena geologis yang signifikan. Adapun hasil identifikasi geodiversity tersebut diklasifikasikan berdasarkan hierarki nilainya menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Geoheritage Bertaraf Internasional Pada tingkatan tertinggi ini, terdapat 5 (lima) situs geologi yang memiliki nilai signifikansi dunia. Situs-situs tersebut meliputi fenomena hidrologi Mata Air Artesis Umbulan, serta kompleks vulkanik purba Ranu Grati yang terdiri secara rinci atas Danau Maar Ranu Grati beserta formasi dinding kalderanya, yakni Tebing Barat

Maar Ranu Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, dan Tebing Selatan Maar Ranu Grati.

- 2) Geoheritage Bertaraf Nasional Pada tingkatan nasional, teridentifikasi sebanyak 4 (empat) situs geologi yang menjadi aset penting negara. Kelompok ini mencakup Mata Air Artesis Banyubiru, pesona alam Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, serta keunikan sistem hidrologi dan speleologi di Mata Air dan Goa Widodaren.
- 3) Geoheritage Bertaraf Lokal Pada tingkatan lokal, terdapat keragaman geologi yang paling banyak jumlahnya, yakni 9 (sembilan) situs. Situs-situs ini meliputi Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, bentang alam Lereng Pintu Langit Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, serta fenomena geologi unik Brown Canyon Gempol.



Gambar 2.4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kajian Geoheritage Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

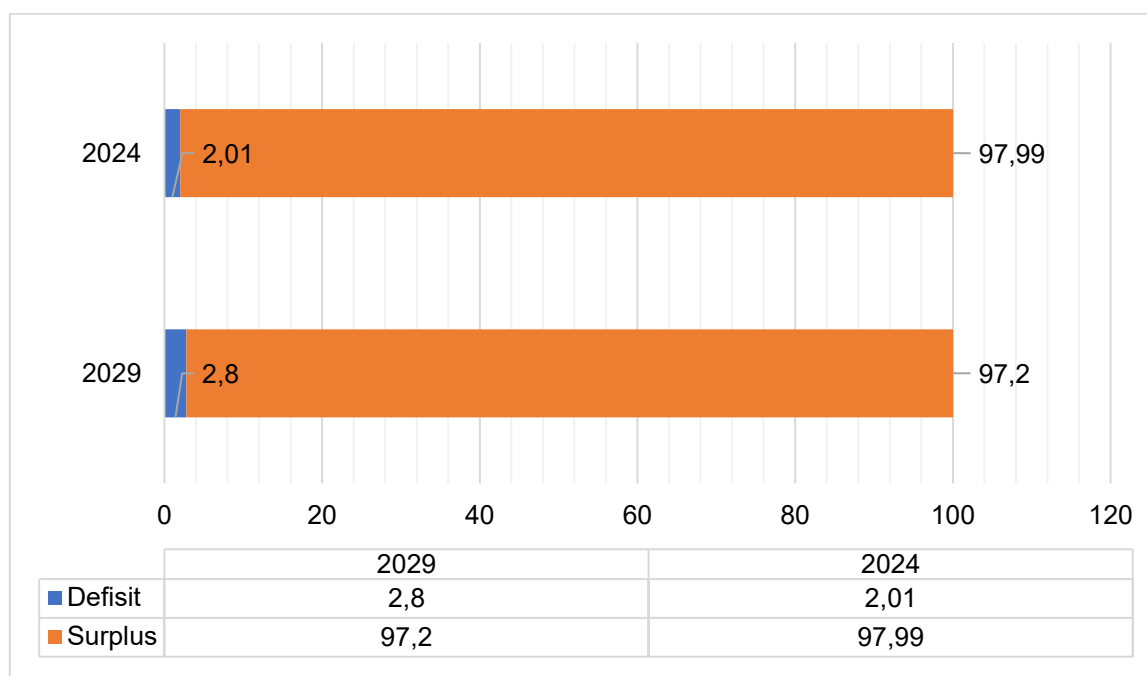
Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun

secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



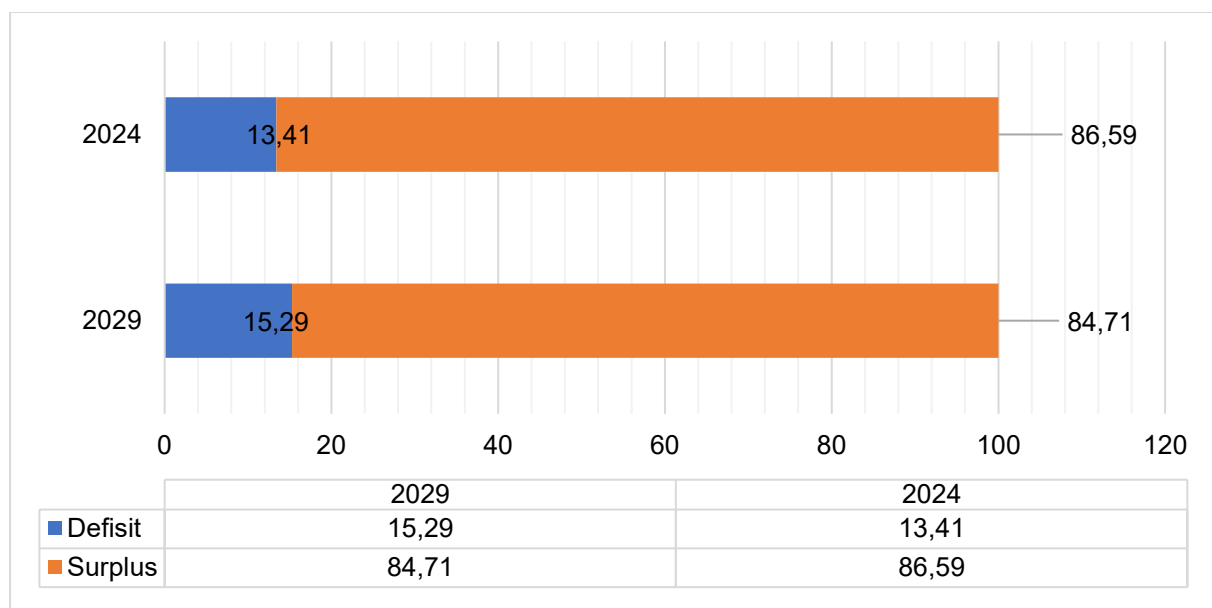
Gambar 2.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.4. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisi dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendongkrak permintaan energi.

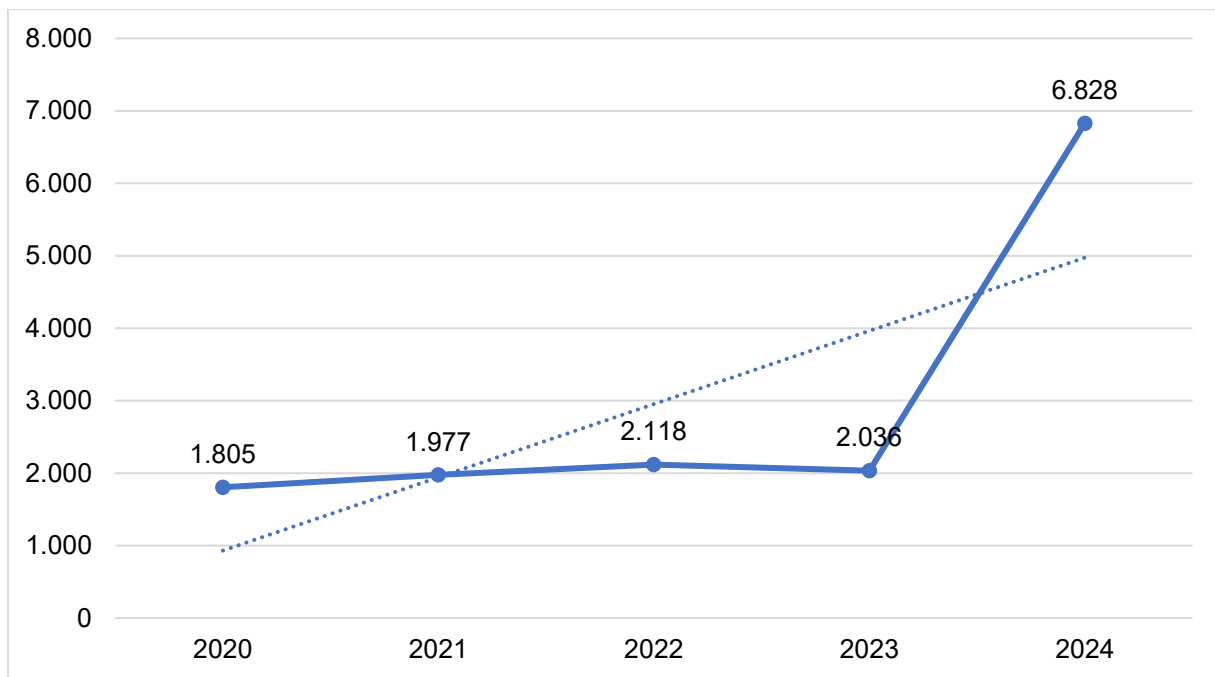
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 2.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

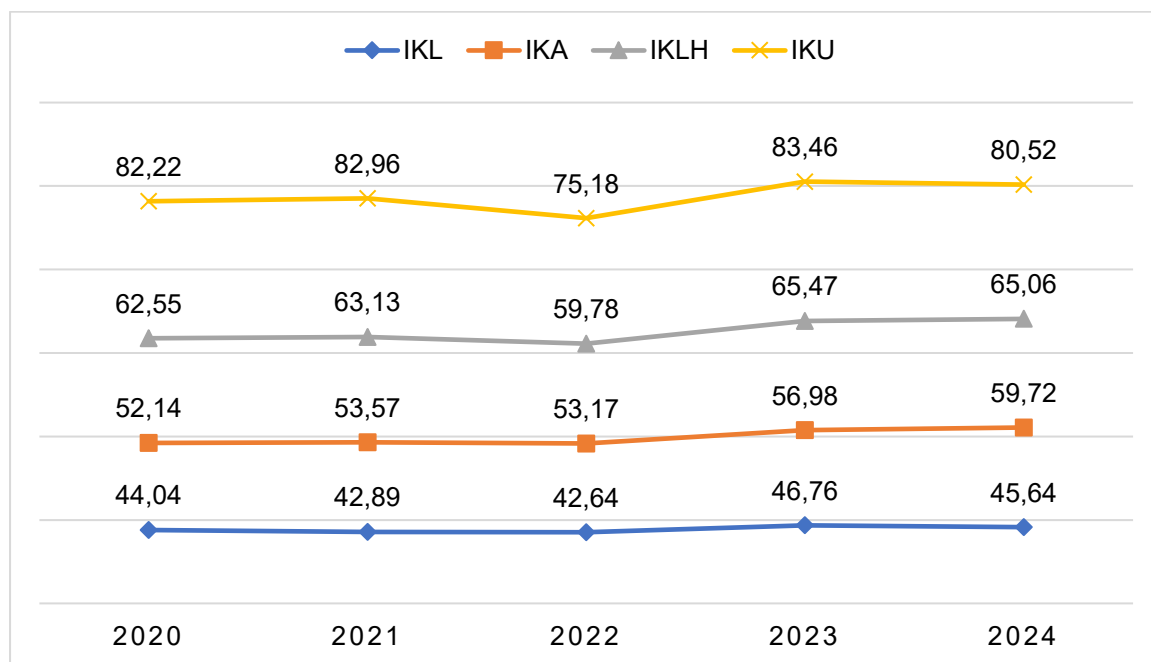
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang

sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang tepat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tanah, tetapi akan berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut..



Gambar 2.8 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh

merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.

2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.6. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai wilayah atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengalami dampak buruk dari berbagai jenis fenomena, baik itu bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia (*man-made disaster*). Tingginya tingkat kerawanan ini tidak terlepas dari karakteristik kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangat kompleks dan beragam. Keberadaan jajaran gunung berapi aktif, hamparan dataran rendah yang luas, serta kondisi ekologis dataran tinggi yang mulai mengalami degradasi

lingkungan, menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki spektrum potensi bencana alam yang cukup luas.

Berdasarkan pemetaan potensi, terdapat enam kategori utama kawasan rawan bencana di wilayah ini, yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Wilayah Kabupaten Pasuruan diapit oleh aktivitas vulkanik yang signifikan. Potensi ini terbagi menjadi dua klaster utama. Pertama, Kawasan Gunung Bromo yang memiliki area rawan bencana seluas 1.320 Ha serta daerah dengan status waspada seluas 751 Ha. Area ini secara administratif mencakup Desa Ngadirejo, Desa Mororejo, Desa Wonokitri, dan Desa Kedawung yang terletak di Kecamatan Tosari. Kedua, Kawasan Gunung Welirang yang memiliki area rawan bencana seluas 1.368 Ha dan daerah waspada seluas 809 Ha. Wilayah paparannya meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, serta meluas hingga Desa Cendono, Desa Sumberejo, dan Desa Tambaksari di wilayah Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah Mengingat topografi wilayah yang berbukit, potensi kawasan rawan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi cukup luas, yakni mencapai 37.626,4 Ha. Kerawanan ini secara spesifik terdapat di wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang curam, yaitu lebih dari 40% (kelerengan > 40%). Zona merah kerawanan longsor ini terkonsentrasi di kawasan dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Tuter, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan Rawan Banjir Ancaman hidrometeorologi berupa banjir memiliki potensi luasan terdampak sebesar 11.948,15 Ha. Bencana ini dominan mengancam wilayah dataran rendah atau daerah hilir yang menjadi muara dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kecamatan yang masuk dalam zona rawan ini antara lain Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Winongan. Mekanisme banjir umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan di

daerah hulu sungai yang tidak mampu tertampung sehingga mengakibatkan air meluap ke kawasan hilir. Selain banjir luapan sungai, terdapat pula ancaman banjir pasang air laut atau *rob* yang secara spesifik mengancam wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton.

4. Kawasan Rawan Angin Puyuh/Puting Beliung Fenomena cuaca ekstrem berupa angin puyuh atau puting beliung memiliki potensi kejadian di wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Sukorejo. Selain itu, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di beberapa kecamatan lain, mengingat adanya tren anomali iklim yang semakin tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir yang dapat memicu kejadian serupa di lokasi yang lebih luas.
5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Potensi kebakaran hutan mengancam wilayah-wilayah yang memiliki tutupan vegetasi hutan dan semak belukar yang kering, terutama saat musim kemarau. Area yang rentan meliputi Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, serta Taman Wisata Alam (TWA) Tretes. Selain itu, kawasan pegunungan di R. Soeryo serta kompleks Pegunungan Arjuno, Welirang, dan Penanggungan yang mencakup wilayah Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol juga memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.
6. Kawasan Rawan Kekeringan Ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan risiko berdasarkan intensitas dan dampaknya, yaitu:
 - Ancaman Kekeringan Tinggi: Berpotensi terjadi secara meluas di beberapa desa, meliputi:
 - Kecamatan Lumbang: Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbung.

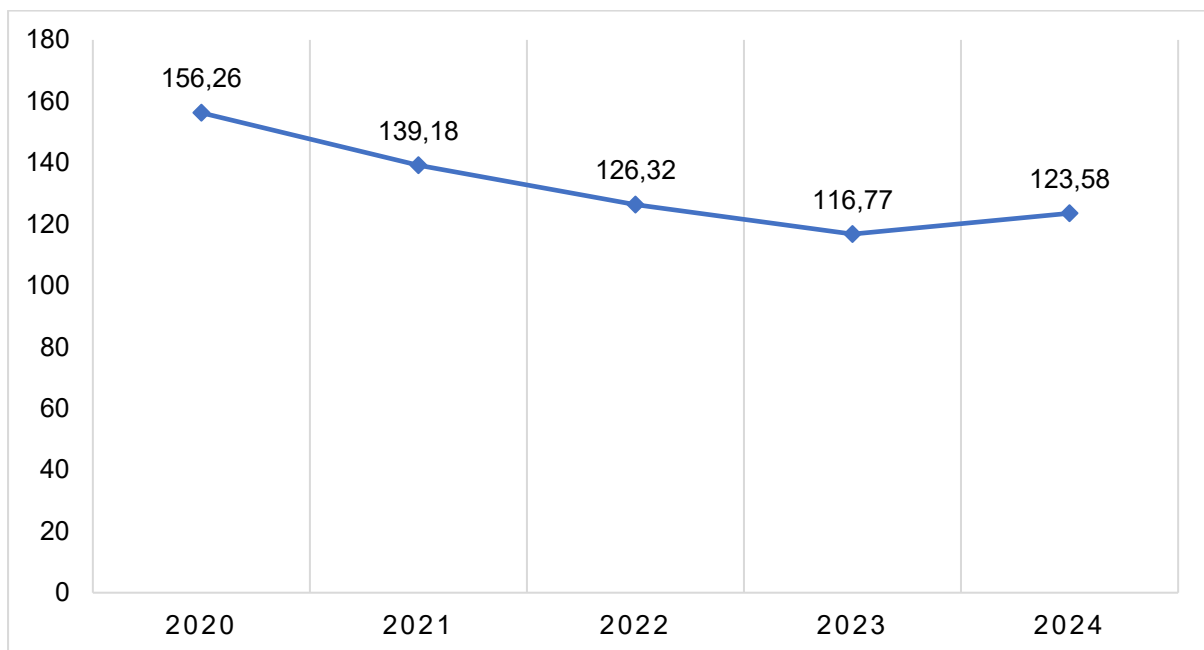
- Kecamatan Kejayan: Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo.
 - Kecamatan Lekok: Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang.
 - Kecamatan Winongan: Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi.
 - Kecamatan Puspo: Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran.
 - Kecamatan Gempol: Desa Bulusari.
 - Kecamatan Grati: Desa Karanglo.
- Ancaman Kekeringan Sedang: Teridentifikasi di wilayah Kecamatan Pasrepan, mencakup Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, dan Desa Tambakrejo.
 - Ancaman Kekeringan Rendah: Terjadi pada skala terbatas di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) serta Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Seluruh potensi kebencanaan yang telah diuraikan sebelumnya dipotret secara sistematis dan dianalisis secara komprehensif melalui instrumen Indeks Risiko Bencana (IRB). Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko secara kuantitatif dengan menilai probabilitas serta besaran dampak yang diperkirakan akan muncul apabila suatu ancaman benar-benar termanifestasi menjadi peristiwa bencana di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, IRB tidak hanya merekam keberadaan ancaman, tetapi juga menggambarkan konsekuensi nyata yang mungkin ditimbulkan terhadap manusia, aset, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi wilayah.

Secara metodologis, IRB merupakan hasil integrasi dari tiga komponen utama, yaitu indeks ancaman (hazard) yang merepresentasikan intensitas dan frekuensi potensi bahaya, indeks kerentanan (vulnerability) yang mencerminkan tingkat

keterpaparan dan kelemahan sistem sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan, dan indeks kapasitas (capacity) yang menunjukkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap bencana. Interaksi ketiga komponen tersebut menghasilkan gambaran risiko yang utuh dan proporsional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang objektif dan terukur.

Hasil pengkajian risiko bencana berbasis IRB ini menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Strategi PRB diarahkan secara simultan untuk menekan tingkat bahaya dan kerentanan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan aspek sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, IRB berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan yang bersifat preventif dan berorientasi pada ketahanan wilayah. Adapun tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan secara visual disajikan dalam gambar berikut sebagai ilustrasi dinamika tingkat risiko bencana dari waktu ke waktu.:



Gambar 2.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

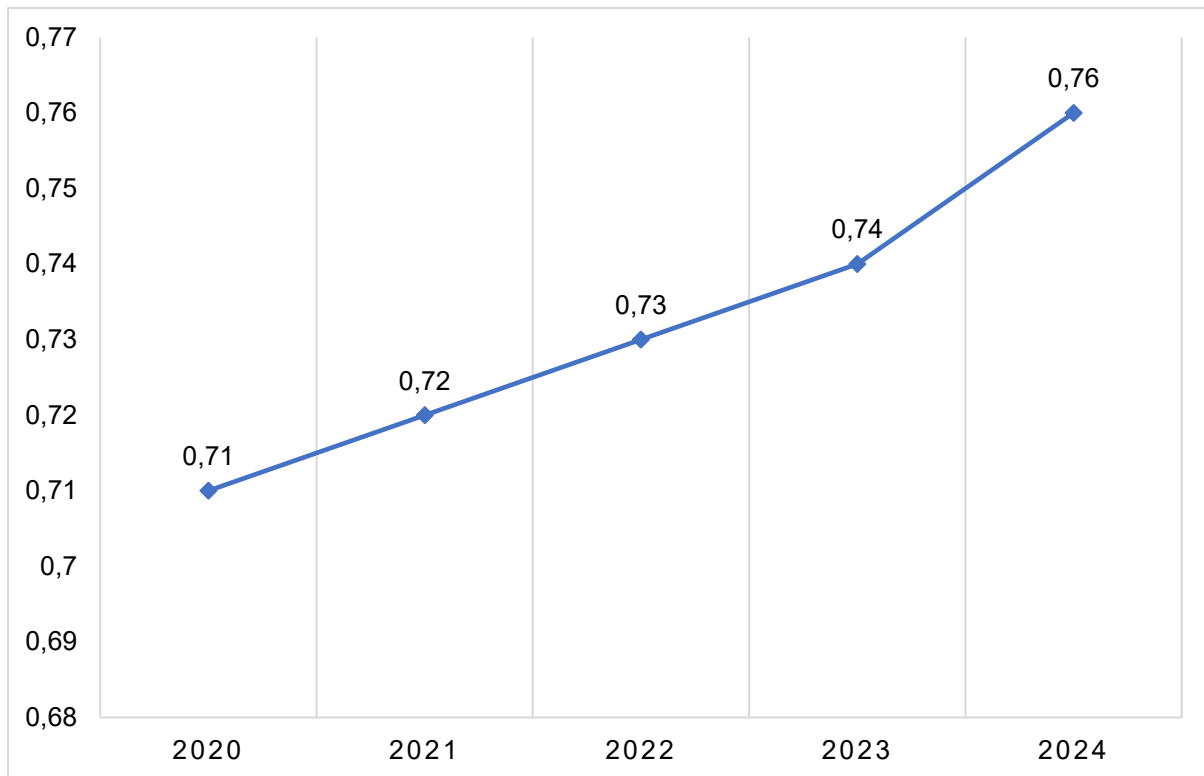
Catatan: Tahun 2024 menggunakan data H&V 2021

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data runtun waktu (*time series*) yang mencakup periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kinerja penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan memperlihatkan capaian yang sangat positif dan menggembirakan. Indikator keberhasilan ini tercermin jelas dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang secara konsisten mengalami tren penurunan di setiap tahun pelaporannya. Akumulasi dari berbagai upaya strategis penurunan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan ini telah berhasil mengubah peta kerawanan daerah, sehingga menempatkan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori risiko bencana tingkat Sedang, sebuah perbaikan status yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian substansial dalam penurunan risiko bencana ini didorong secara signifikan oleh penguatan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak, utamanya melalui akselerasi program pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Progresivitas pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh ini terlihat sangat nyata dari data pertumbuhan tahunan yang terus menunjukkan grafik meningkat. Pada tahun 2020, tercatat baru terdapat 10 desa/kelurahan yang berstatus tangguh bencana. Jumlah ini kemudian bertambah secara bertahap menjadi 14 desa/kelurahan pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 18 desa/kelurahan pada tahun 2022, dan mencapai 20 desa/kelurahan pada tahun 2023. Puncaknya, terjadi lonjakan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024 dengan total capaian kumulatif sebanyak 30 desa/kelurahan yang telah berhasil dikukuhkan statusnya sebagai wilayah tangguh bencana.

Ditinjau secara teoritis maupun praktis, tren penurunan nilai IRB ini memiliki korelasi linier yang kuat dan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman. Fenomena positif ini selaras dengan naiknya grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebuah metrik yang merepresentasikan tingkat kesiapan dan ketangguhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola keseluruhan siklus manajemen bencana. Peningkatan ketahanan daerah yang solid ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun di atas fondasi penguatan lima pilar utama kapasitas yang fundamental, yaitu penguatan struktur kelembagaan yang responsif, optimalisasi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang akurat, penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang masif kepada publik, serta

implementasi upaya mitigasi fisik maupun non-fisik dan kesiapsiagaan yang terencana dengan matang. Gambaran komprehensif mengenai hubungan kausalitas antara penurunan risiko dan peningkatan ketahanan daerah ini disajikan secara visual dalam Gambar berikut:



Gambar 2.10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

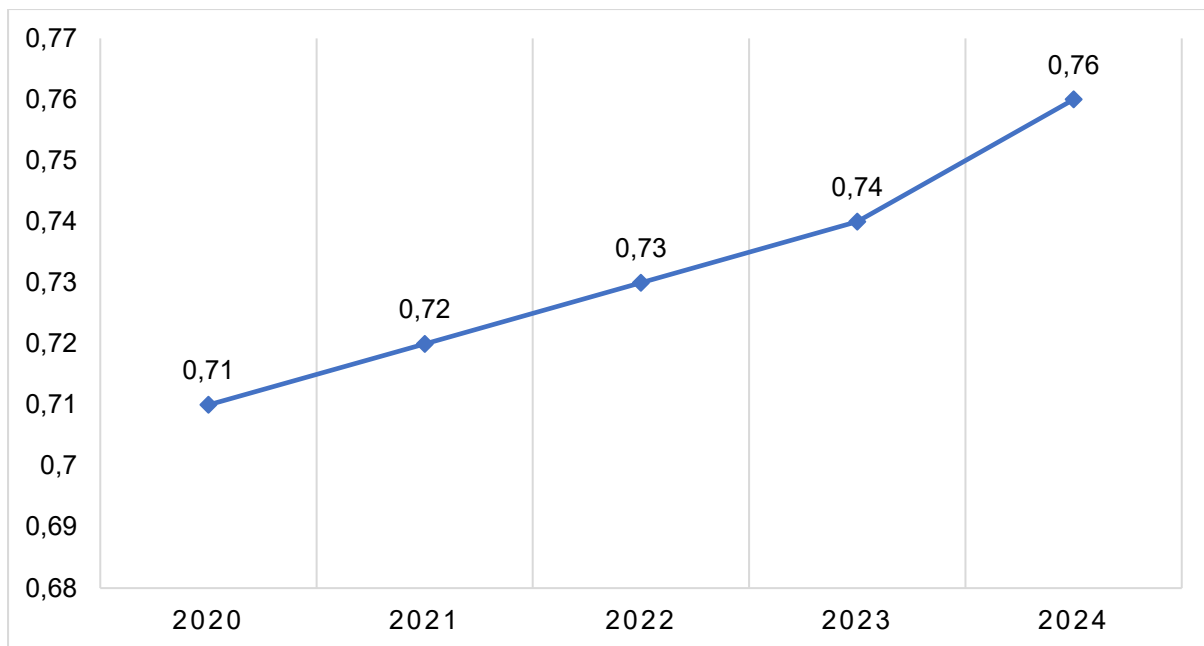
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Eskalasi fenomena bencana alam yang melanda suatu wilayah kini tidak lagi dapat dipandang secara parsial sebagai akibat tunggal dari faktor kerawanan geofisik lokal semata. Lebih jauh dari itu, frekuensi dan intensitas bencana telah berakselerasi secara dramatis akibat dampak destruktif dari fenomena global perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu efek domino yang luas, sistemik, dan multidimensi, yang tidak hanya mengancam stabilitas pertumbuhan sektor ekonomi dan menghambat produktivitas daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat secara umum melalui munculnya vektor penyakit baru, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang vital. Secara spesifik, ancaman langsung yang paling nyata dan meresahkan dari krisis iklim ini bermanifestasi dalam bentuk kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang secara spesifik membahayakan keberlangsungan kawasan

pesisir melalui ancaman abrasi dan banjir rob, serta anomali cuaca berupa peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang polanya semakin volatil, acak, dan sulit diprediksi dampaknya.

Merespons dinamika lingkungan yang semakin kritis tersebut, implementasi upaya mitigasi perubahan iklim menjadi langkah mutlak, imperatif, dan mendesak yang harus dilakukan guna mereduksi risiko kerusakan sistemik bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam kerangka strategis ini, pelaksanaan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menempati posisi sentral sebagai langkah fundamental atau batu pijakan awal. Upaya inventarisasi ini bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, valid, dan komprehensif guna mengidentifikasi, mengukur, serta memetakan sumber-sumber emisi karbon secara presisi. Tujuannya adalah agar strategi pengurangan emisi dapat dirumuskan secara *evidence-based* dan dieksekusi secara terukur, sistematis, serta tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas yang menjadi penyumbang emisi terbesar, seperti sektor energi, limbah, maupun pertanian.

Selanjutnya, efektivitas kinerja mitigasi daerah ini dievaluasi secara ketat melalui indikator intensitas emisi GRK, dengan fokus utama pada parameter Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂eq). Berdasarkan hasil pemantauan data terintegrasi melalui platform Sistem Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Nasional Rendah Karbon (AKSARA) dengan data mutakhir yang diakses pada tanggal 30 Mei 2024, tercatat fakta yang menggembirakan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif berupa kenaikan grafik yang sangat signifikan sejak tahun dasar 2020. Lonjakan capaian angka potensi penurunan ini bukan sekadar representasi statistik di atas kertas semata, melainkan sebuah manifestasi konkret dari kuatnya komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam berkontribusi aktif menyukseskan upaya global mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang rendah karbon, hijau, dan berkelanjutan. Adapun rincian detail mengenai tren capaian komitmen penurunan emisi ini divisualisasikan secara lengkap pada Gambar berikut:



Gambar 2.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

2.7. Demografi

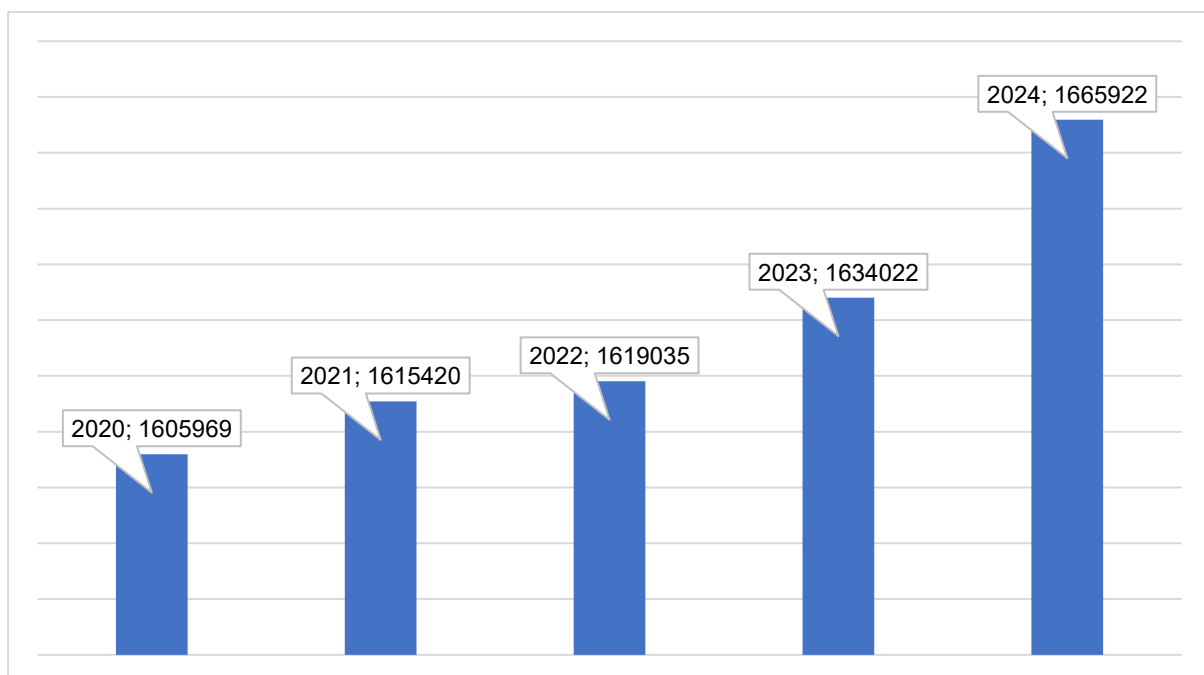
Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan,

dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969

jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan.

Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

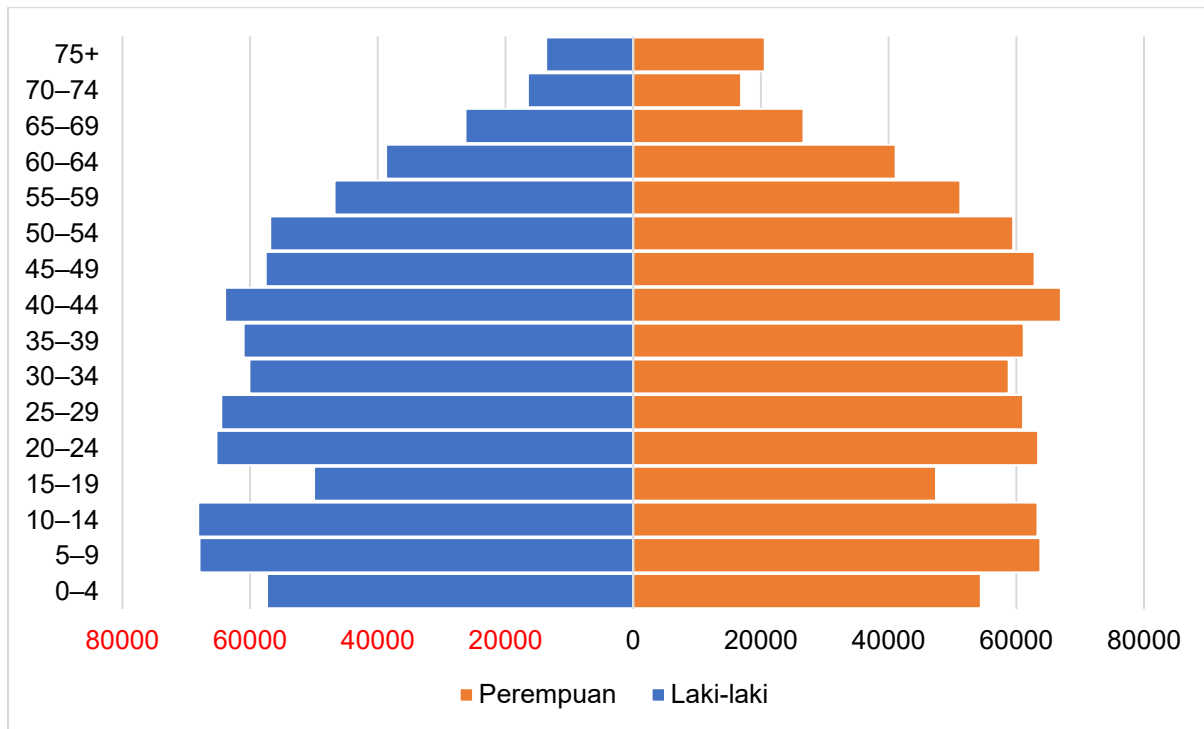
Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnean, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.

2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km^2). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/ km^2 , angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/ km^2 . Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya

seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65

21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta

keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2.11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honororer	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025
(Data diolah)*

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai

30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat	15,25	14,56	14,05	13,78
	SD/ sederajat				
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat	13,55	13,37	13,24	13,24
	SLTP/ sederajat				
5	Tamat	16,24	16,65	16,91	16,98
	SLTA/ sederajat				
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghuchu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030.

Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribuan Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km ²)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,
2024, diolah*

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.8. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata

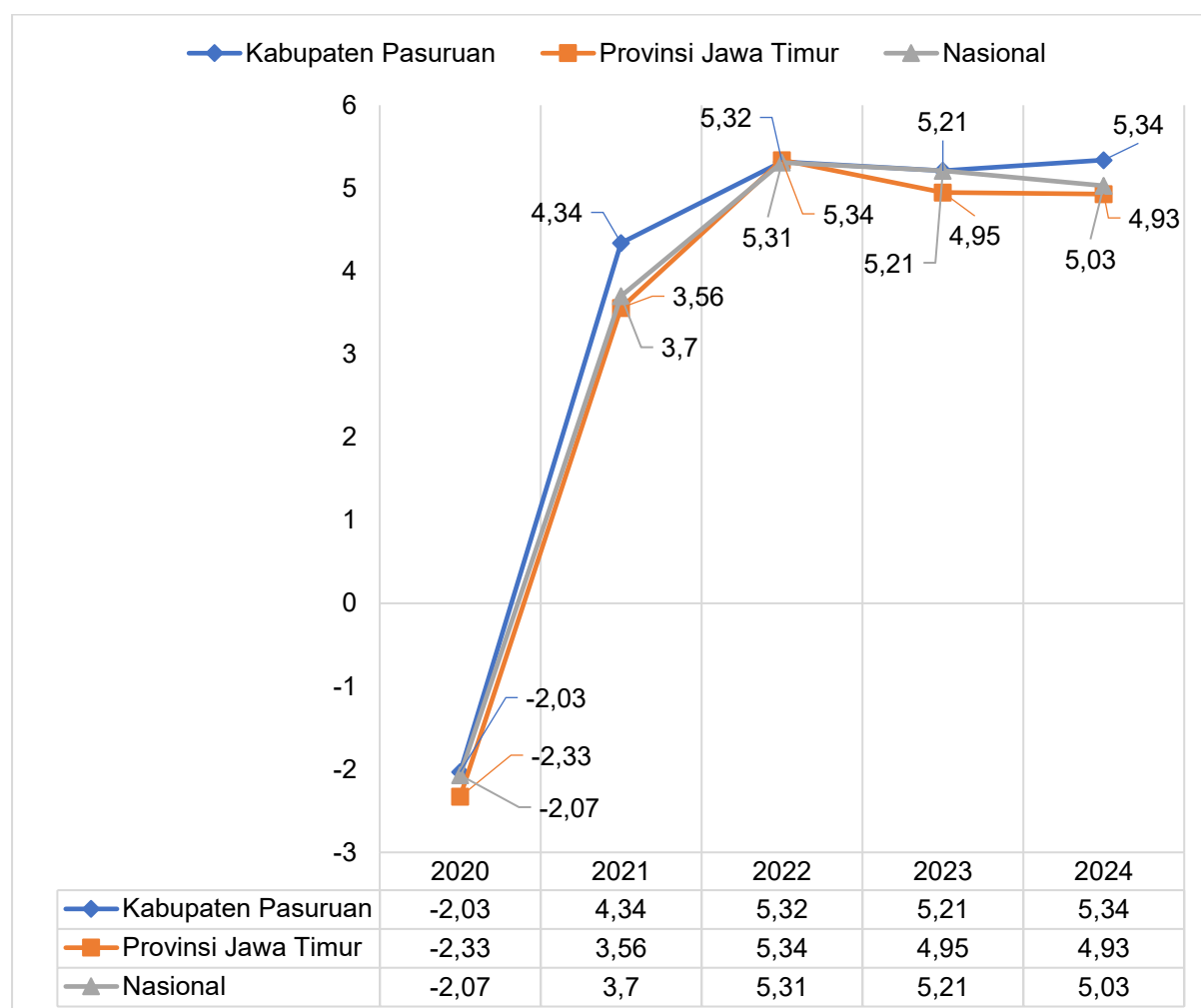
pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun

beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.



Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

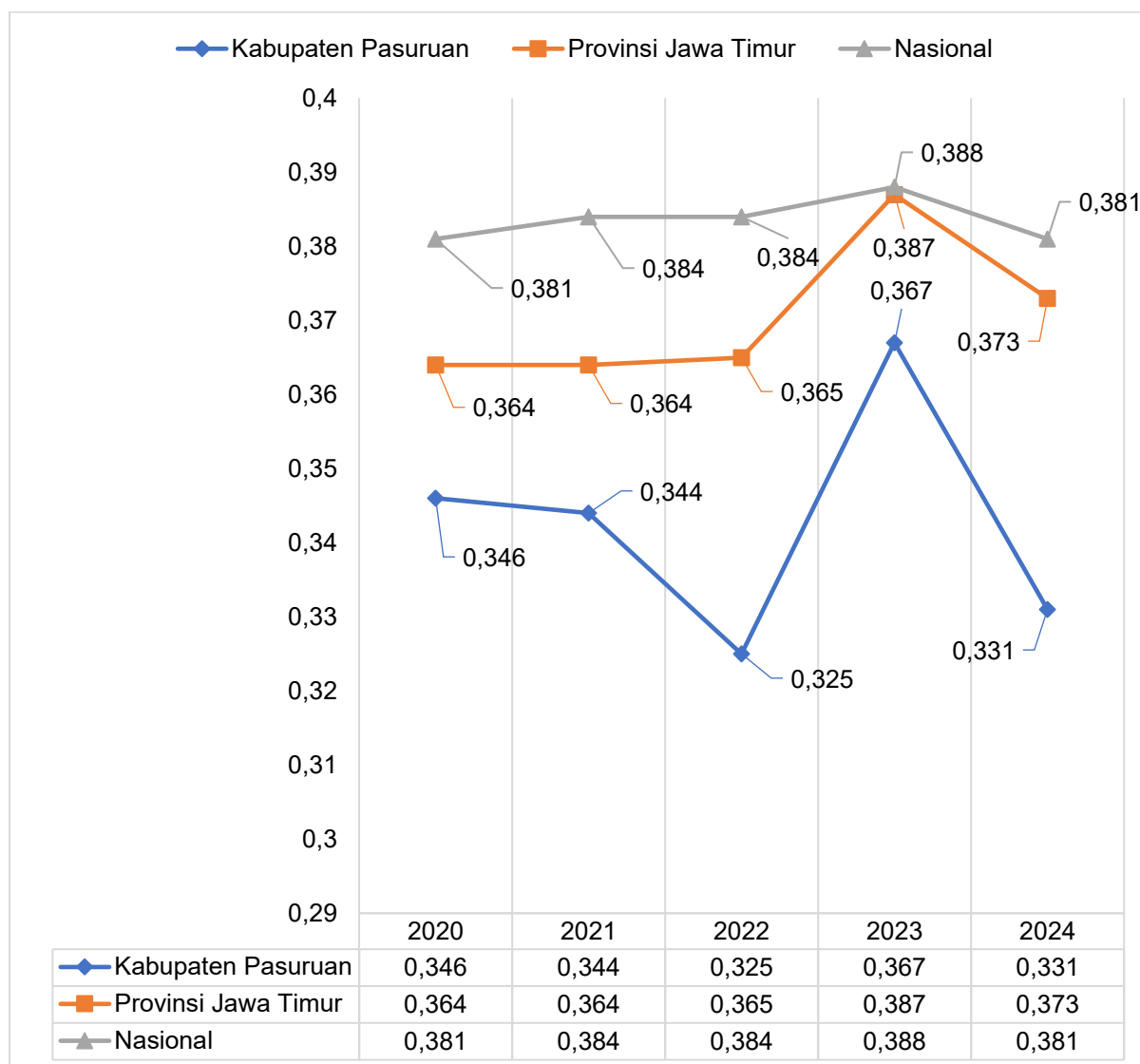
B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

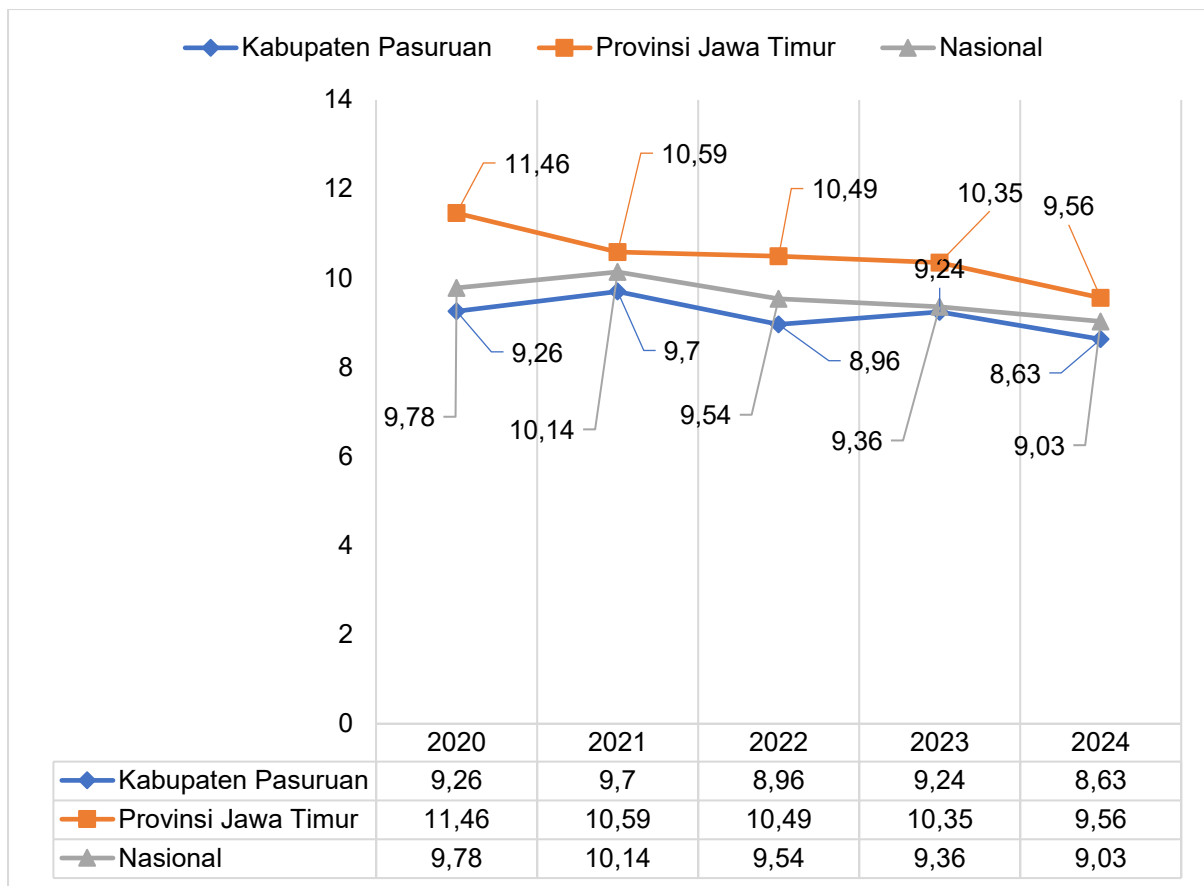
Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2.16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

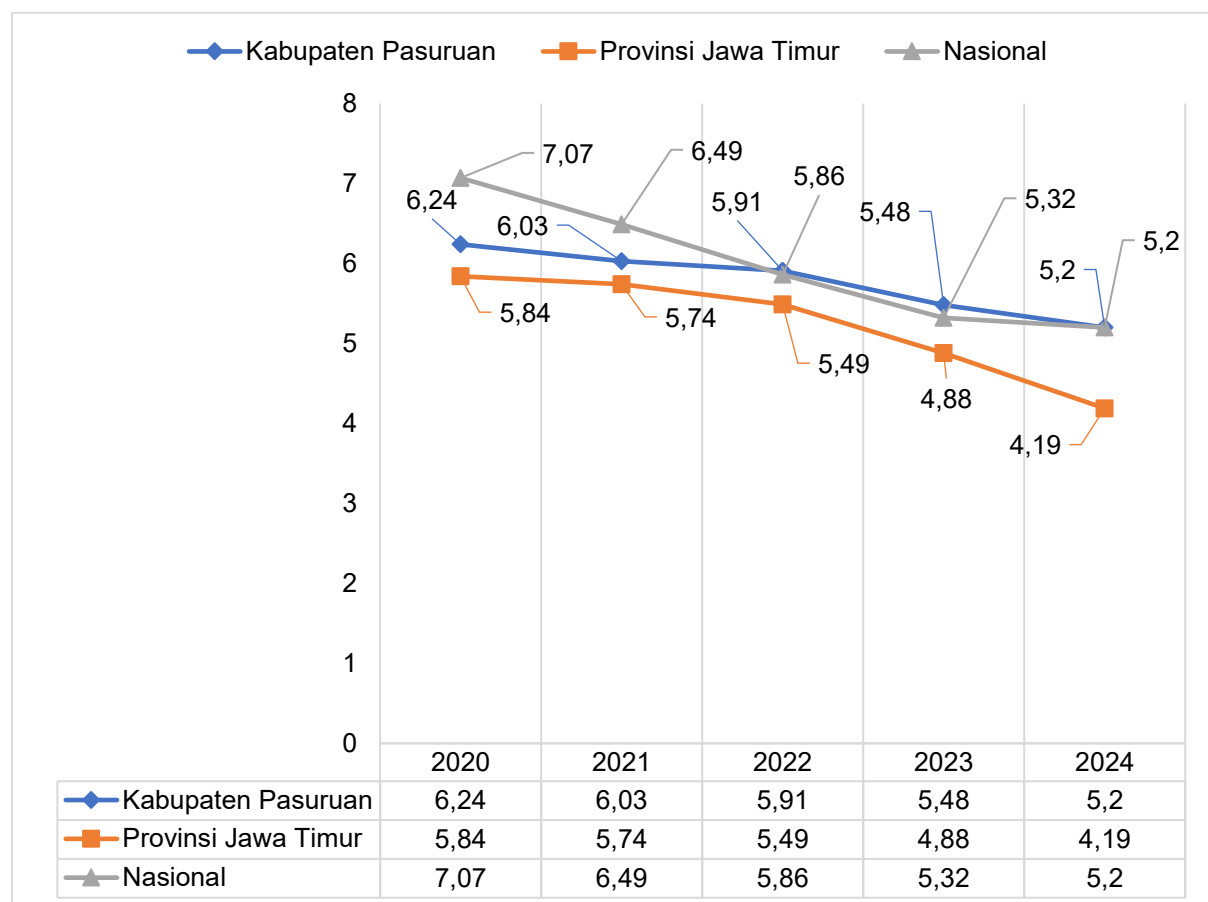
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 2.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2.19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" (IPM $\geq$ 70) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2.20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78

Uraian	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

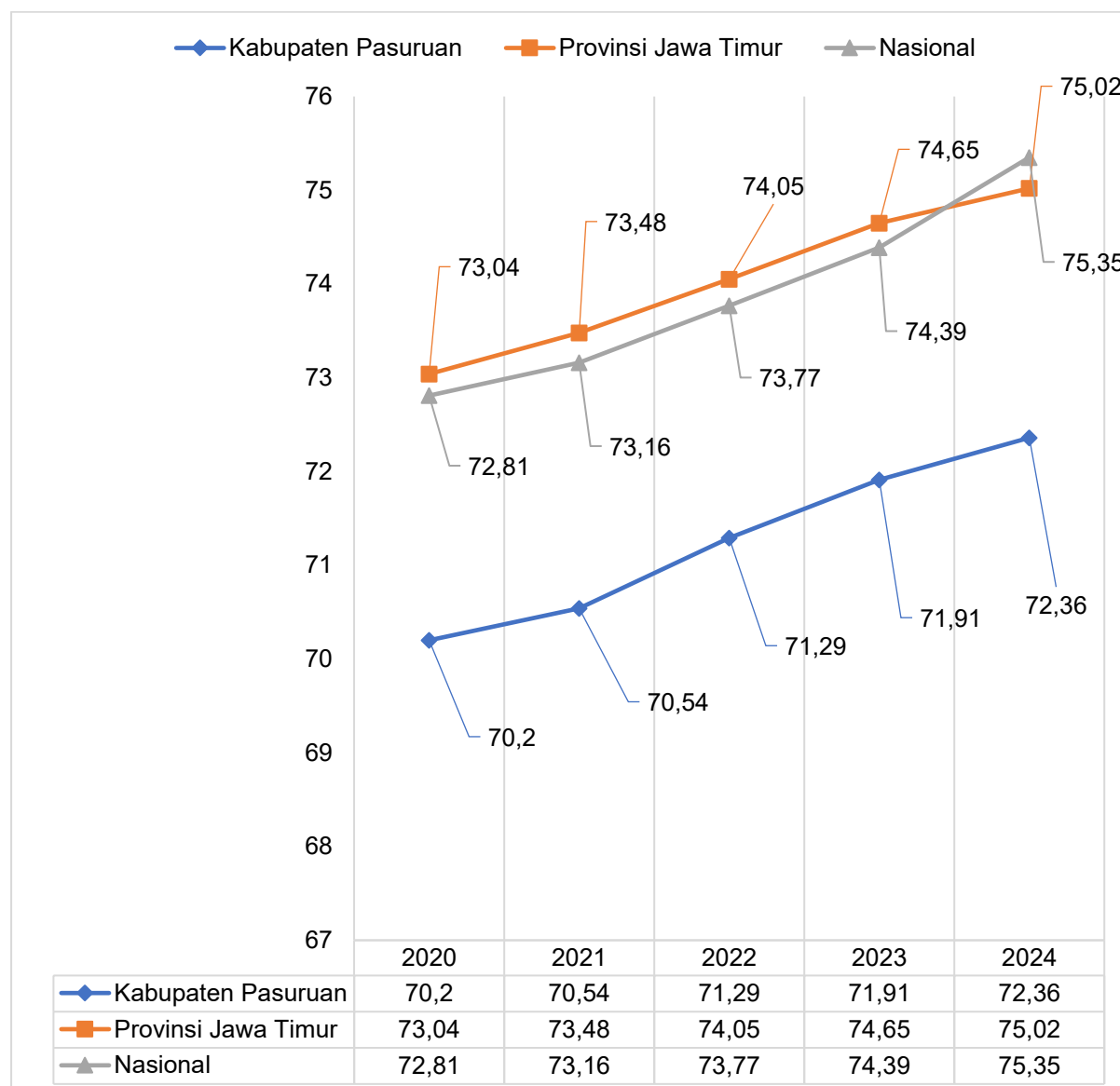
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif

ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

BAB III

ANALISIS SITUASI PREVALENSI DAN SEBARAN STUNTING

3.1. Perkembangan Prevalensi Stunting

Langkah fundamental dalam penyusunan strategi percepatan penurunan stunting yang efektif adalah melakukan pemetaan kondisi eksisting secara komprehensif. Analisis situasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besaran angka prevalensi semata, melainkan untuk memahami dinamika pergerakan masalah gizi dari waktu ke waktu (*temporal analysis*) serta posisi relatif kinerja daerah dalam konstelasi regional (*spatial analysis*). Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendasarkan evaluasi kinerjanya pada dua sumber data utama yang memiliki karakteristik, metodologi, dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

Sumber data pertama adalah data hasil survei berskala nasional, yakni Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang kemudian bertransformasi menjadi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Data ini bersifat makro strategis dan diperoleh melalui metode pengambilan sampel (*sampling method*) pada blok sensus terpilih. Sumber data kedua adalah data pencatatan dan pelaporan rutin daerah melalui sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Data ini bersifat mikro operasional, dikumpulkan secara sensus (*total coverage*) melalui pengukuran riil balita *by name by address* di seluruh Posyandu. Sinergi pemahaman terhadap kedua dataset ini menjadi kunci vital untuk menghindari bias interpretasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta memastikan intervensi yang dirancang benar-benar berbasis bukti (*evidence-based policy*).

A. Dinamika Fluktuasi Tren Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Analisis terhadap data seri waktu (*time series*) yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memperlihatkan sebuah fenomena dinamika prevalensi stunting yang sangat fluktuatif dan penuh tantangan di Kabupaten Pasuruan. Jika ditelusuri ke belakang, pada periode tahun 2019, Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada situasi kedaruratan gizi yang cukup serius. Data SSGI tahun 2019 merekam angka prevalensi stunting sebesar 29,30%. Angka ini tidak hanya tinggi secara absolut, tetapi juga menempatkan Kabupaten Pasuruan

berada di posisi yang kurang menguntungkan karena melampaui rata-rata prevalensi Provinsi Jawa Timur yang kala itu tercatat sebesar 26,86%. Gap negatif ini menjadi indikasi awal bahwa beban masalah stunting di Kabupaten Pasuruan pada fase awal RPJMD relatif lebih berat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

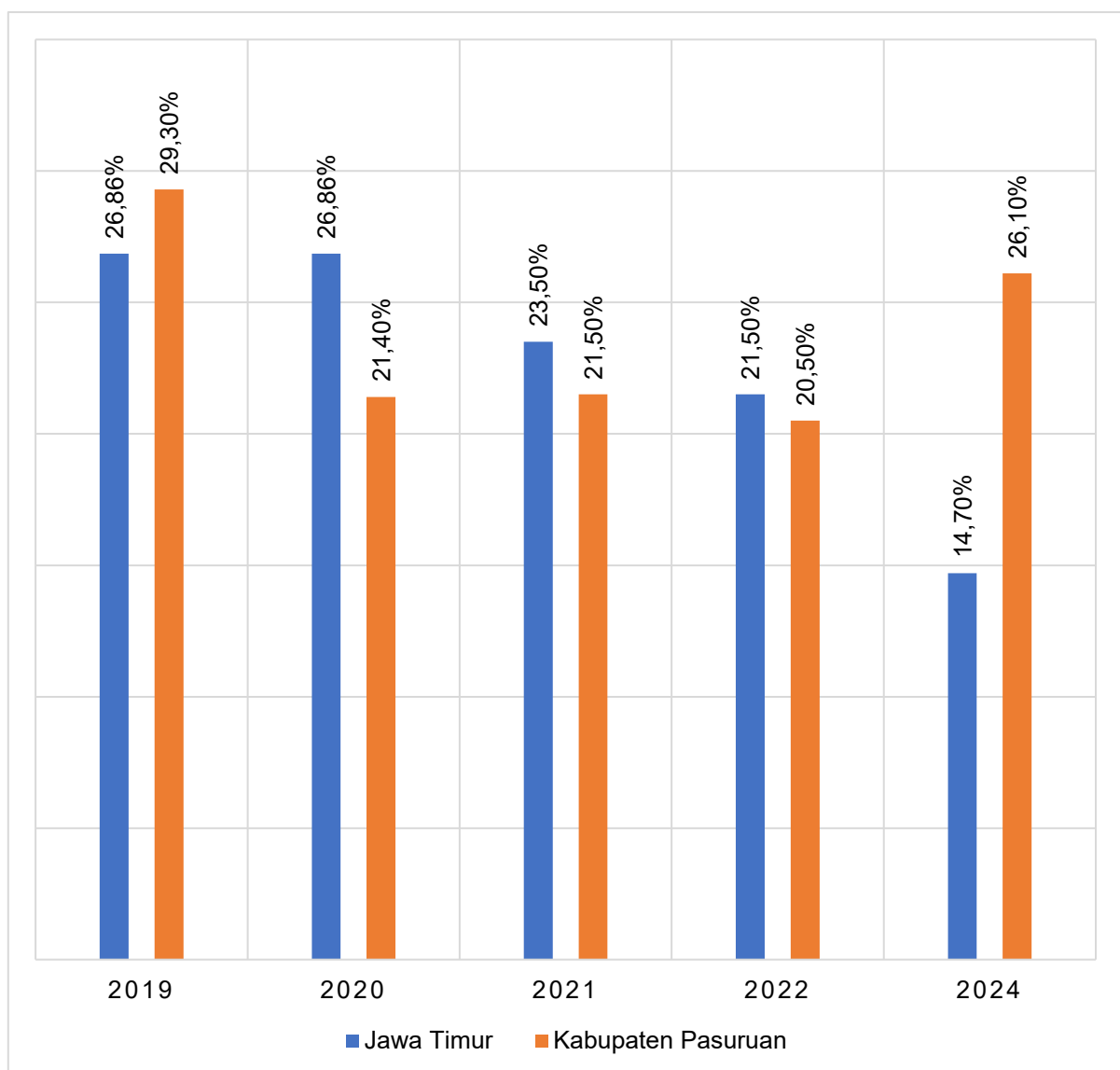
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan akselerasi konvergensi program yang melibatkan lintas sektor. Upaya masif ini mulai membuahkan hasil statistik yang sangat positif pada tahun 2020. Data SSGI mencatat terjadinya penurunan tajam (*sharp decline*) pada prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan, yang turun drastis menjadi 21,40%. Capaian ini merepresentasikan sebuah lompatan kinerja yang luar biasa dan patut diapresiasi, terutama jika disandingkan dengan performa Provinsi Jawa Timur. Pada tahun yang sama, rata-rata Provinsi Jawa Timur justru mengalami stagnasi dan bertahan di angka 26,86%. Pada momentum tahun 2020 ini, Kabupaten Pasuruan berhasil membalikkan keadaan (*turning point*) dengan capaian kinerja yang jauh lebih baik (lebih rendah) dibandingkan provinsi, membuktikan efektivitas intervensi awal yang telah dilakukan.

Stabilitas tren penurunan ini relatif dapat dipertahankan pada periode tahun 2021 hingga 2022, meskipun dengan laju penurunan yang melambat. Pada tahun 2021, di saat Provinsi Jawa Timur mulai berhasil menurunkan angkanya secara signifikan menjadi 23,50%, Kabupaten Pasuruan masih mampu menjaga performanya di angka 21,50%. Selanjutnya, pada tahun 2022, tren positif tersebut berlanjut dengan penurunan prevalensi menjadi 20,50%. Penurunan ini berjalan beriringan dengan tren perbaikan di tingkat provinsi yang juga menurun ke angka 21,50%. Pada fase ini, terlihat adanya keselarasan pola penurunan antara daerah dan provinsi, yang menandakan adanya stabilitas program penanganan stunting pasca pandemi COVID-19.

Akan tetapi, sebuah fenomena anomali statistik yang mengejutkan terjadi pada publikasi data SSGI tahun 2024. Terjadi divergensi atau pemisahan arah tren yang sangat mencolok dan kontradiktif antara kinerja Kabupaten Pasuruan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Di satu sisi, Provinsi Jawa Timur mencatatkan keberhasilan yang fenomenal dengan penurunan prevalensi secara drastis menjadi 14,70%, sebuah angka psikologis yang sudah mendekati target nasional RPJMN. Di sisi lain, secara paradoks, data SSGI justru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di

Kabupaten Pasuruan mengalami lonjakan kenaikan yang kuat (*strong rebound*). Angka prevalensi tercatat naik kembali menjadi 26,10%.

Kenaikan sebesar 5,6 poin persentase dari tahun 2022 ke 2024 ini menempatkan Kabupaten Pasuruan kembali ke zona kewaspadaan tinggi. Divergensi ini menciptakan kesenjangan performa yang lebar, di mana Kabupaten Pasuruan tertinggal lebih dari 11 digit dibandingkan capaian provinsi. Fenomena kenaikan angka survei di tengah gencarnya intervensi lapangan ini memerlukan kecermatan analisis mendalam, apakah disebabkan oleh faktor determinan baru yang muncul, atau variabilitas sampel survei yang berbeda dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.1 Hasil Survei Status Gizi Indonesia

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

B. Konsistensi Penurunan Sistematis Berdasarkan Data E-PPGBM

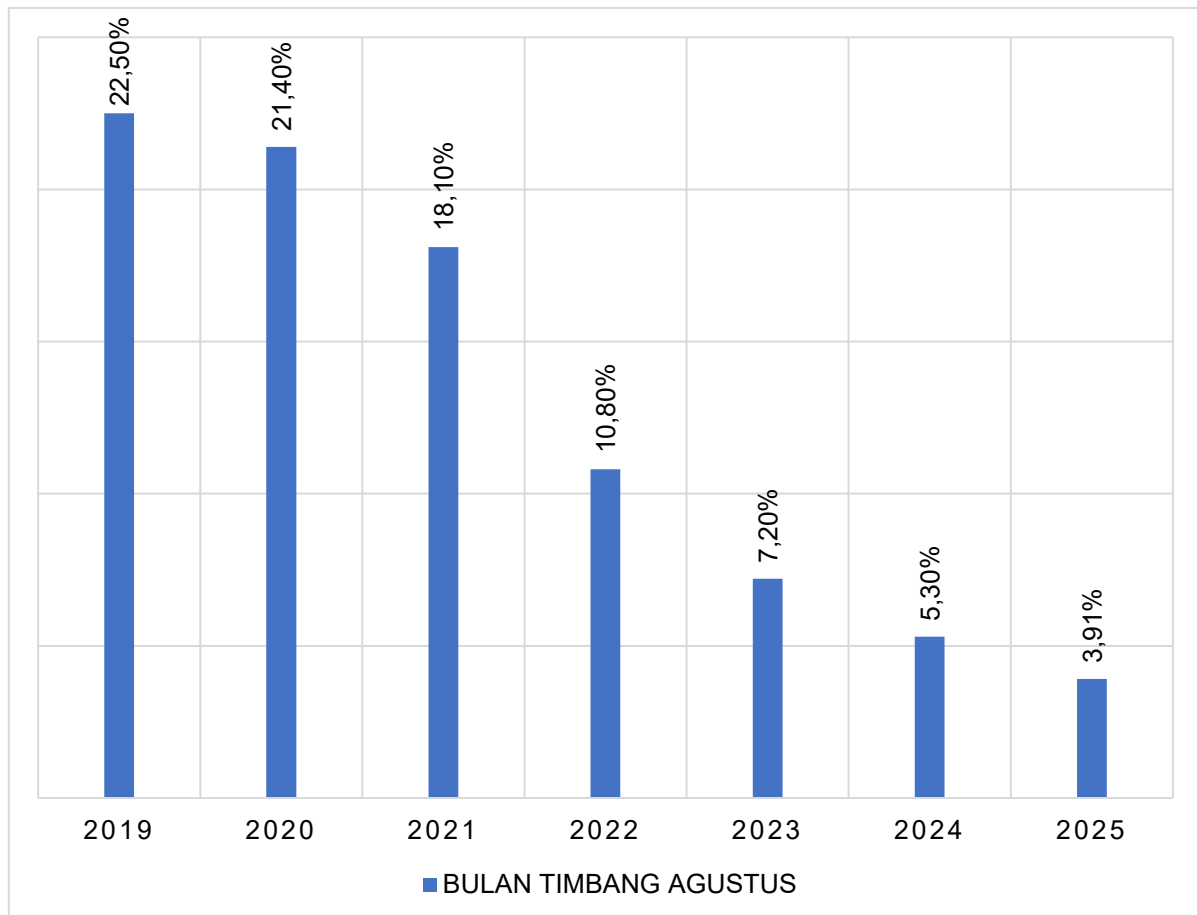
Berbeda secara diametral dengan pola fluktuasi dan volatilitas yang ditunjukkan oleh data survei, hasil pengukuran riil di lapangan melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menyajikan narasi keberhasilan yang jauh lebih konsisten, linear, dan meyakinkan. Data E-PPGBM memiliki keunggulan komparatif karena dikumpulkan secara *bottom-up* dari tingkat Posyandu, melibatkan pengukuran fisik langsung terhadap balita sasaran, dan bersifat *by name by address*. Hal ini menjadikan data E-PPGBM sebagai representasi akurat dari efektivitas operasional program yang menyentuh langsung penerima manfaat.

Berdasarkan rekam jejak data E-PPGBM, tren penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan terjadi secara sistematis dari tahun ke tahun tanpa terputus. Pada tahun 2019, data E-PPGBM mencatat prevalensi stunting sebesar 22,50%. Angka ini kemudian mengalami penurunan bertahap menjadi 21,40% pada tahun 2020. Memasuki tahun 2021, akselerasi penurunan mulai terlihat semakin signifikan, di mana prevalensi turun menjadi 18,10%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa intervensi spesifik seperti pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemantauan pertumbuhan balita mulai memberikan dampak nyata terhadap status gizi masyarakat.

Momentum perbaikan gizi balita semakin terakselerasi secara eksponensial pada tahun 2022, di mana capaian prevalensi stunting berhasil ditekan hingga menyentuh angka satu digit (*single digit*), yaitu 10,80%. Tren positif yang sangat progresif ini tidak berhenti, melainkan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian angka 7,20%. Puncaknya, pada tahun 2024, data E-PPGBM mencatatkan angka prevalensi yang sangat rendah, yaitu 5,30%. Penurunan yang konsisten ini membuktikan bahwa mesin birokrasi dan kader kesehatan di lini lapangan bekerja secara efektif dalam mengawal pertumbuhan balita.

Lebih jauh lagi, berdasarkan data mutakhir estimasi tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan diproyeksikan telah menyentuh angka terendah dalam sejarah pembangunan kesehatan daerah, yaitu 3,91%. Konsistensi penurunan dari level 22,50% (2019) hingga mencapai 3,91% (2025) merupakan bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa secara operasional, jumlah balita pendek dan sangat

pendek di Kabupaten Pasuruan terus berkurang secara masif. Keberhasilan menekan angka hingga di bawah 5% ini menempatkan Kabupaten Pasuruan dalam jalur yang tepat (*on the right track*) untuk mewujudkan visi *Zero Stunting* atau bebas stunting dalam waktu dekat.

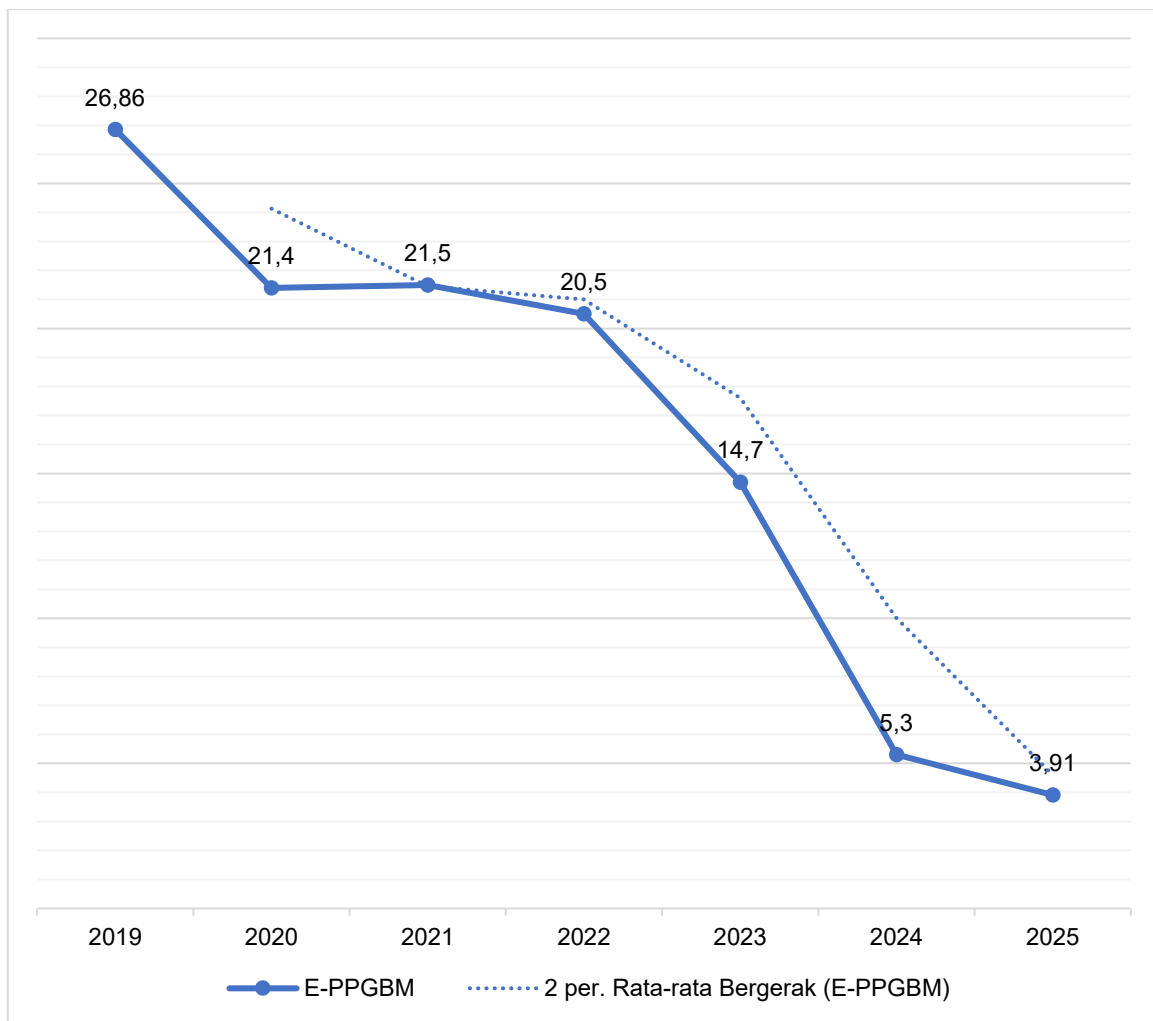


Gambar 3.2 Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Bulan Agustus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Jika ditarik garis data historis sejak tahun 2019 hingga 2025, terlihat adanya pola penurunan yang sangat konsisten, progresif, dan meyakinkan. Hal ini mengonfirmasi bahwa strategi konvergensi yang diterapkan telah berada di jalur yang tepat (*on the right track*).

Berikut adalah rekam jejak penurunan prevalensi stunting berdasarkan E-PPGBM:



Gambar 3.3 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2019-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

C. Analisis Disparitas Data (Komparasi SSGI vs E-PPGBM)

Dalam konteks manajemen data pembangunan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam evaluasi program stunting adalah adanya fenomena kesenjangan (*gap*) angka yang lebar antara hasil survei (SSGI) dengan data rutin (E-PPGBM). Analisis komparasi mendalam terhadap kedua sumber data ini (sebagaimana tersaji dalam Tabel Data 12) mengungkapkan pola divergensi yang semakin melebar seiring berjalannya waktu.

Pada periode awal, khususnya tahun 2020, kedua sumber data tersebut menunjukkan tingkat konvergensi (kesesuaian) statistik yang sangat tinggi. Data SSGI mencatat angka 21,4%, dan secara presisi data E-PPGBM juga mencatat angka yang

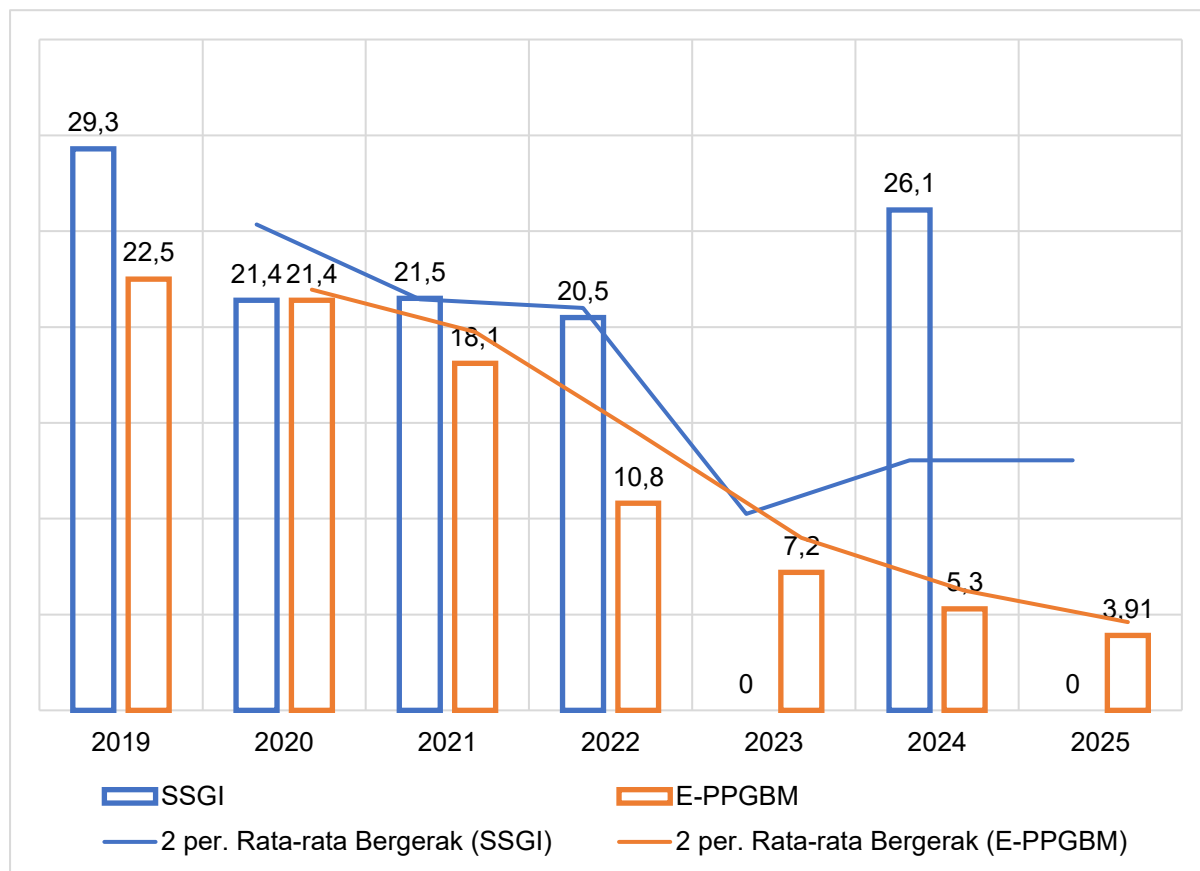
identik yaitu 21,4%. Kesamaan angka ini memberikan konfirmasi validitas yang kuat bahwa pada periode tersebut, hasil survei sampel selaras sepenuhnya dengan kondisi riil populasi di lapangan. Tidak ada perdebatan data pada fase ini.

Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, terjadi pelebaran disparitas data yang semakin ekstrem dan signifikan. Pada tahun 2021, selisih mulai terlihat di mana SSGI mencatat 21,5% sedangkan E-PPGBM sudah turun ke 18,1%. Jurang perbedaan semakin menganga pada tahun 2022, dengan selisih angka mencapai hampir 10 poin persentase (SSGI bertahan di 20,5% sementara E-PPGBM turun tajam ke 10,8%). Puncak disparitas data terjadi pada tahun 2024, di mana SSGI melaporkan kenaikan prevalensi menjadi 26,1%, sementara E-PPGBM melaporkan penurunan drastis menjadi 5,3%. Pada titik ini, terdapat selisih absolut yang sangat masif, yakni lebih dari 20 poin persentase.

Perbedaan angka yang sangat mencolok ini sejatinya disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam metodologi pengambilan data. SSGI menggunakan pendekatan survei dengan sampel blok sensus yang dirancang untuk merepresentasikan populasi namun tetap memiliki potensi *sampling error* dan keterbatasan jumlah sampel di tingkat kabupaten. Di sisi lain, E-PPGBM menggunakan pendekatan sensus partisipatif yang mengandalkan kehadiran balita di Posyandu. Meskipun E-PPGBM memiliki tantangan dalam hal cakupan partisipasi (D/S), namun data ini lebih menggambarkan kondisi operasional harian dan memiliki keunggulan karena sifatnya yang dapat ditelusuri (*traceable*) hingga ke tingkat individu.

Menyikapi dualisme data ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil sikap kebijakan yang adaptif. Angka SSGI tetap dijadikan bahan evaluasi kinerja makro dan peringatan kewaspadaan (*early warning system*) bahwa masih ada potensi kantong-kantong masalah yang mungkin belum terjangkau atau terdeteksi dalam sampel survei. Namun, dalam tataran eksekusi program dan penentuan target intervensi, data E-PPGBM digunakan sebagai basis data operasional utama. Hal ini dikarenakan data E-PPGBM memungkinkan intervensi yang presisi *by name by address*, sehingga bantuan pangan, layanan kesehatan, dan perbaikan sanitasi dapat langsung diarahkan kepada keluarga yang terdata stunting. Capaian E-PPGBM tahun 2025 sebesar 3,91% menjadi motivasi utama bahwa kerja keras seluruh elemen

daerah sesungguhnya telah membuahkan hasil nyata dalam menyelamatkan generasi penerus Kabupaten Pasuruan.



Catatan: 0 = Tidak Diketahui

Gambar 3.4 Perbandingan SSGI dan E-PPGBM

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

3.2. Analisis Capaian Remaja Putri

Analisis terhadap situasi stunting di Kabupaten Pasuruan tidak dapat dilepaskan dari penanganan pada fase hulu siklus kehidupan, yaitu fase remaja. Remaja Putri (Rematri) memegang posisi strategis sebagai calon ibu di masa depan. Status kesehatan dan gizi mereka saat ini merupakan prediktor kuat terhadap kualitas kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan kelak. Oleh karena itu, intervensi pada kelompok ini difokuskan pada upaya pencegahan anemia defisiensi besi, yang merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya kelahiran bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan stunting. Dalam kerangka evaluasi tahun 2025, kinerja layanan kesehatan remaja putri diukur melalui dua indikator utama: kepatuhan

konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) dan cakupan skrining anemia (pemeriksaan Hemoglobin).

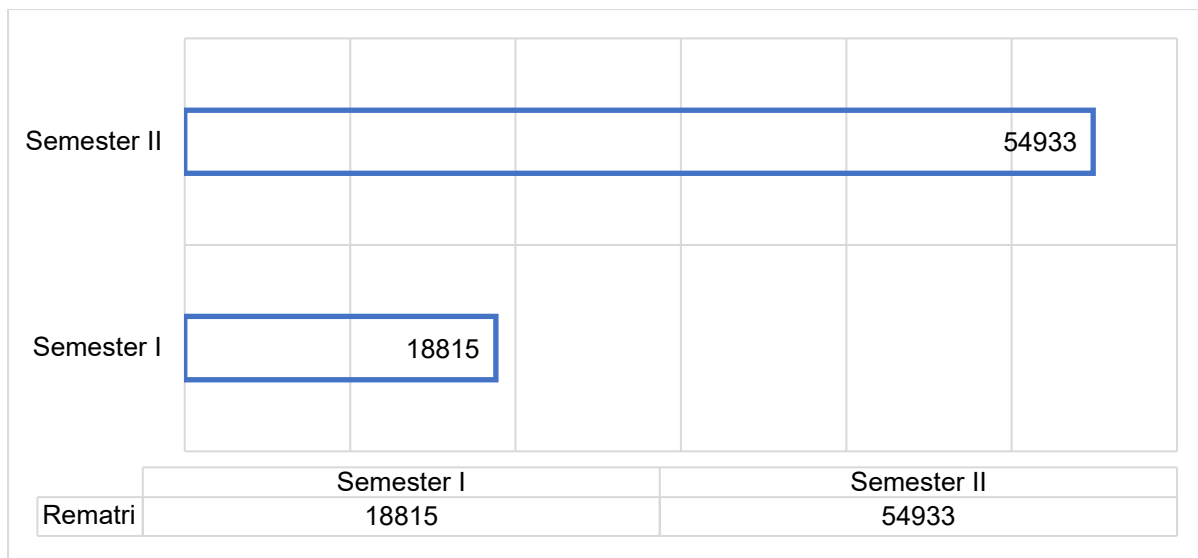
A. Dinamika Distribusi dan Kepatuhan Konsumsi TTD

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri, khususnya yang berada di bangku sekolah (SMP/SMA sederajat), merupakan intervensi spesifik yang bertujuan untuk memastikan kecukupan zat besi guna mendukung pertumbuhan pesat dan mengganti kehilangan darah akibat menstruasi. Berdasarkan data rekapitulasi kinerja tahun 2025, terlihat adanya dinamika progresif dalam pelaksanaan distribusi TTD di Kabupaten Pasuruan.

Pada Semester I (Januari-Juni), capaian distribusi TTD tercatat menjangkau sebanyak 18.815 remaja putri. Angka ini, jika ditinjau dari sisi manajemen program, mengindikasikan adanya tantangan distribusi pada awal tahun anggaran. Rendahnya capaian pada semester pertama ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional, seperti belum optimalnya logistik distribusi ke sekolah-sekolah, adanya masa libur sekolah, atau masih rendahnya tingkat kepatuhan konsumsi di tingkat siswi yang memerlukan evaluasi metode pemantauan minum obat.

Namun, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas mampu melakukan langkah korektif (*corrective action*) yang sangat responsif dan masif pada paruh kedua tahun berjalan. Hal ini terbukti dari lonjakan drastis capaian pada Semester II (Juli-Desember), di mana jumlah remaja putri yang mendapatkan TTD meningkat tajam menjadi 54.933 remaja putri.

Terjadi kenaikan kinerja hampir tiga kali lipat (291%) dibandingkan semester sebelumnya. Eskalasi angka yang sangat signifikan ini menunjukkan keberhasilan strategi "Aksi Bergizi" di sekolah-sekolah dan intensifikasi penyisiran sasaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan guru UKS. Lonjakan dari 18 ribu ke 54 ribu sasaran ini bukan sekadar angka statistik, melainkan merepresentasikan keberhasilan mobilisasi sasaran secara besar-besaran untuk memastikan remaja putri Kabupaten Pasuruan terlindungi dari risiko anemia. Konsistensi kinerja tinggi di Semester II ini perlu dijadikan standar acuan (*baseline*) untuk pelaksanaan program di tahun 2026 agar tidak terjadi penurunan kembali di awal tahun.



Gambar 3.5 Grafik Kepatuhan Konsumsi TTD Rematri Semester I dan II

B. Cakupan Skrining Anemia (Pemeriksaan Hemoglobin)

Selain intervensi suplementasi TTD, langkah diagnostik melalui pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) menjadi instrumen vital untuk mendeteksi secara dini status anemia pada remaja putri. Deteksi dini ini memungkinkan dilakukannya tatalaksana medis segera bagi remaja yang terbukti anemia ($Hb < 12 \text{ g/dL}$) sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan.

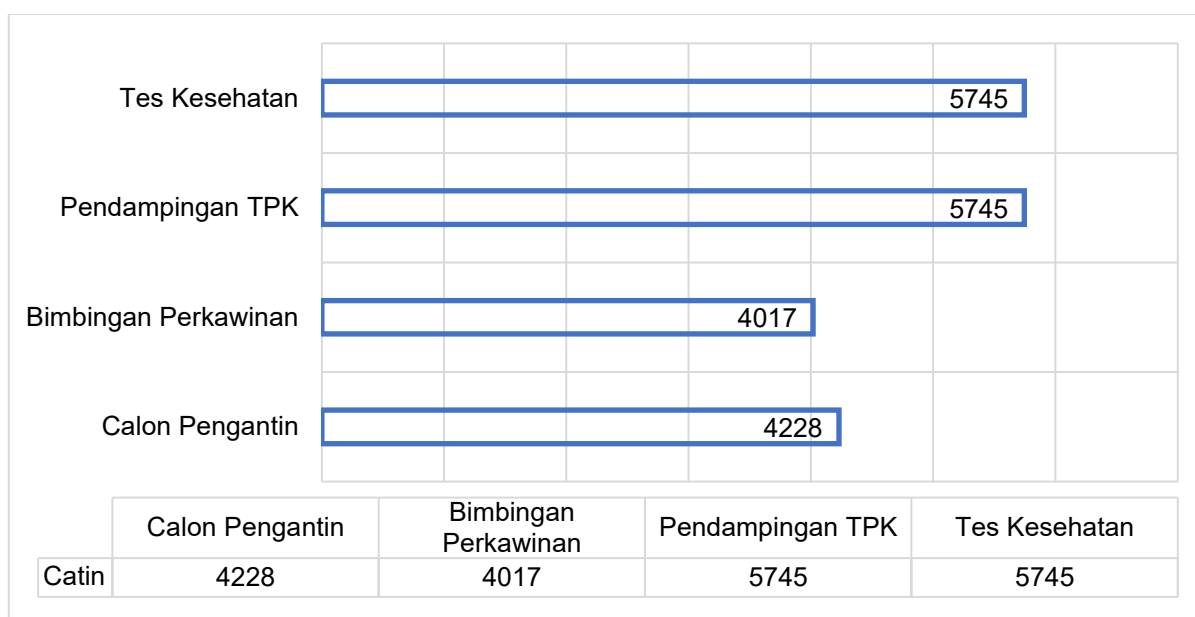
Berdasarkan data agregat tahun 2025, total remaja putri yang telah menjalani pemeriksaan anemia di Kabupaten Pasuruan tercatat sebanyak 38.633 siswi/remaja. Secara persentase, capaian ini setara dengan 70% dari total populasi sasaran riil yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Angka cakupan 70% ini mengindikasikan bahwa mayoritas remaja putri di Kabupaten Pasuruan telah terpantau status kesehatannya. Capaian ini sudah tergolong baik (zona hijau), namun analisis teknokratik tetap harus menyoroti adanya *gap* atau kesenjangan pelayanan sebesar 30% sasaran yang belum terskrining.

Sisa 30% populasi yang belum terjangkau ini merupakan "kelompok risiko tersembunyi" (*hidden risk group*). Mereka umumnya adalah remaja putri yang putus sekolah, berada di pondok pesantren yang belum terintegrasi dengan Poskestren, atau remaja yang tidak hadir saat jadwal skrining massal dilakukan. Strategi *sweeping* atau jemput bola menjadi rekomendasi mutlak untuk menjangkau kelompok ini.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan kesehatan remaja putri menunjukkan tren perbaikan yang sangat positif, terutama dalam hal ekspansi jangkauan sasaran TTD. Integrasi antara pemberian TTD yang masif (54.933 sasaran) dan skrining yang cukup luas (38.633 sasaran) menjadi modalitas kuat bagi Kabupaten Pasuruan untuk memutus mata rantai stunting dari hulu.

3.3. Analisis Capaian Calon Pengantin

Pergeseran paradigma penanganan *stunting* dari pendekatan kuratif-rehabilitatif menuju pendekatan preventif-promotif menempatkan fase pra-konsepsi sebagai "garis pertahanan pertama" (*first line of defense*). Kelompok sasaran Calon Pengantin (Catin) memegang peranan yang sangat fundamental dalam memutus mata rantai masalah gizi antar-generasi. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari sepenuhnya bahwa status kesehatan dan gizi pasangan usia subur saat ini adalah prediktor mutlak bagi kualitas kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan kelak. Oleh karena itu, intervensi pada kelompok Catin tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai imperatif strategis. Strategi ini dioperasionisasikan melalui integrasi dua pilar layanan utama: pilar edukasi kognitif melalui Bimbingan Perkawinan dan pilar deteksi dini biologis melalui Skrining Kesehatan serta Pendampingan Intensif.



Gambar 3.6 Jumlah Intervensi Sasaran Calon Pengantin

Sumber: Kementerian Agama, DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan, diolah

A. Kinerja Layanan Edukasi dan Bimbingan Perkawinan

Indikator pertama untuk mengukur kesiapan mental, psikologis, dan pengetahuan Catin dalam membangun keluarga berkualitas adalah tingkat partisipasi dalam Bimbingan Perkawinan (Binwin). Program ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya membekali Catin dengan pemahaman keagamaan dan psikologi keluarga, tetapi juga disisipkan materi krusial mengenai kesehatan reproduksi, gizi seimbang, dan pencegahan *stunting* pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Berdasarkan data registrasi administratif tahun berjalan, populasi sasaran Calon Pengantin yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Pasuruan tercatat sebanyak 4.228 pasang/Catin. Dari total populasi sasaran tersebut, kinerja layanan edukasi menunjukkan capaian yang sangat solid, di mana sebanyak 4.017 Catin telah diverifikasi mendapatkan layanan Bimbingan Perkawinan secara lengkap.

Secara statistik, capaian ini merepresentasikan tingkat kepatuhan (*compliance rate*) yang sangat tinggi, yakni mencapai 95%. Angka 95% ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti keberhasilan kolaborasi lintas sektoral yang harmonis antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem regulasi yang mewajibkan sertifikasi bimbingan sebelum akad nikah telah berjalan efektif sebagai "filter pengetahuan". Hanya terdapat residu marjinal sekitar 5% (211 Catin) yang belum tercatat mengikuti bimbingan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor variabilitas jadwal pernikahan yang mendadak atau kendala teknis administratif. Namun secara substansial, tingginya cakupan ini menjadi modal sosial yang sangat kuat, karena mengindikasikan bahwa hampir seluruh entitas keluarga baru di Kabupaten Pasuruan telah terpapar informasi vital mengenai pencegahan *stunting* sebelum mereka memulai kehidupan rumah tangga.

B. Fenomena Eskalasi Kinerja Pendampingan TPK dan Skrining Kesehatan

Jika capaian pada aspek edukasi tergolong "sangat baik", maka capaian pada indikator intervensi fisik dan pengawalan melekat menunjukkan fenomena kinerja yang luar biasa (*extraordinary performance*) dan melampaui ekspektasi target administratif. Analisis pada indikator Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pemeriksaan Kesehatan memperlihatkan sebuah anomali positif yang patut diapresiasi.

Berdasarkan data lapangan, jumlah Catin yang telah mendapatkan pendampingan intensif oleh TPK pada periode kritis (3 bulan sebelum menikah) menembus angka 5.745 Catin. Menariknya, angka yang identik secara presisi (5.745 Catin) juga tercatat pada indikator jumlah Catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan (skrining) di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pertama, Keberhasilan Integrasi Layanan yang Sempurna. Kesamaan angka absolut antara jumlah yang didampingi TPK (5.745) dengan jumlah yang diperiksa kesehatannya (5.745) membuktikan bahwa sistem rujukan berjalan tanpa cela (*seamless integration*). Artinya, setiap satu orang Catin yang disentuh oleh TPK di desa, dipastikan berhasil digiring untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas atau Faskes lainnya. Tidak ada *missed opportunity* atau sasaran yang tercecer di tengah jalan. Sinergi antara Kader KB/PKK di lapangan dengan Bidan di fasilitas kesehatan telah membentuk ekosistem layanan yang tertutup rapat dan efektif.

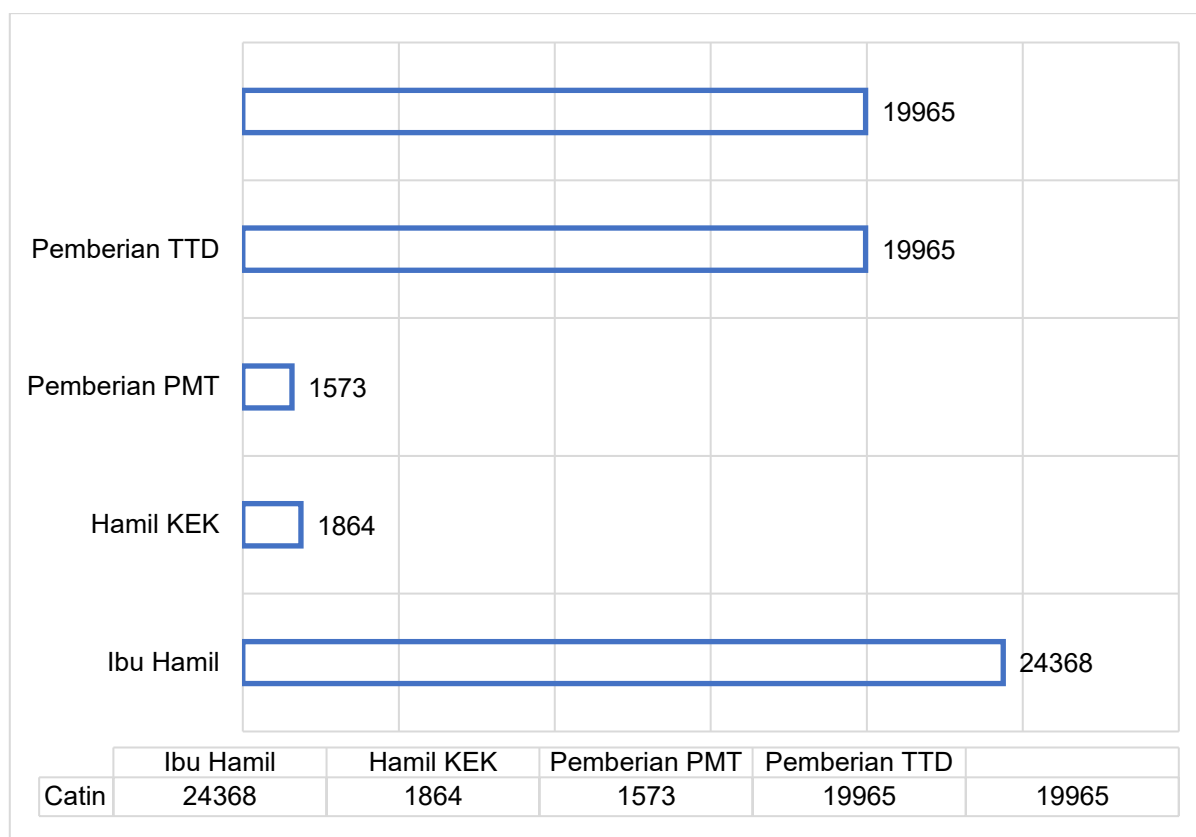
Kedua, Fenomena *Over-Achievement* dan Agresivitas Penjangkauan. Jika angka capaian ini (5.745) disandingkan dengan penyebut/denominator jumlah Catin terdaftar (4.228), maka terlihat adanya surplus capaian kinerja sebesar 135% (di atas 100%). Surplus ini bukanlah kesalahan data, melainkan indikator agresivitas operasional. Hal ini menunjukkan bahwa TPK bergerak jauh lebih proaktif dan masif dibandingkan laju pendaftaran administratif pernikahan. Kader TPK berhasil melakukan penjangkauan (*active case finding*) terhadap pasangan-pasangan yang mungkin belum mendaftarkan diri secara resmi di KUA pada bulan pelaporan, namun secara faktual sudah mempersiapkan pernikahan di masyarakat. Selain itu, efektivitas implementasi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai syarat administrasi pernikahan terbukti menjadi instrumen pemaksa (*forcing mechanism*) yang ampuh untuk memobilisasi Catin melakukan skrining kesehatan.

Implikasi dari surplus layanan ini sangat krusial bagi peta pencegahan stunting. Dengan 5.745 Catin yang telah diskruining secara medis (cek Hb, LILA, golongan darah, dll), Dinas Kesehatan kini memiliki *database* risiko yang sangat komprehensif. Catin yang terdeteksi mengalami Anemia atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) dapat langsung diintervensi dengan suplementasi dan tata laksana medis *sebelum* pembuahan terjadi. Ini adalah bentuk nyata dari upaya memutus mata rantai stunting

dari hulu, memastikan setiap janin di Kabupaten Pasuruan kelak tumbuh dalam rahim ibu yang sehat dan siap secara fisik.

3.4. Analisis Capaian Ibu Hamil

Dalam arsitektur strategi percepatan penurunan *stunting*, fase kehamilan menempati posisi sentral sebagai periode paling kritis dalam jendela peluang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode 270 hari masa kehamilan merupakan fase pembentukan organ vital dan pertumbuhan janin yang sangat deterministik. Kegagalan pemenuhan gizi pada fase ini bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) dan berisiko tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang merupakan prediktor utama terjadinya *stunting*. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menempatkan intervensi kesehatan ibu hamil sebagai prioritas absolut. Analisis situasi pada klaster ini difokuskan pada dua dimensi utama: manajemen penanganan kelompok risiko tinggi (Ibu Hamil Kurang Energi Kronis/KEK) dan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan dasar (Antenatal Care dan Suplementasi).



Gambar 3.7 Jumlah Intervensi Sasaran Ibu Hamil

Sumber: Dinas Kesehatan, diolah

A. Pemetaan Risiko Gizi dan Intervensi pada Ibu Hamil KEK

Langkah pertama dalam manajemen risiko stunting adalah mengidentifikasi besaran populasi sasaran dan menapis kelompok yang memiliki kerentanan gizi spesifik. Berdasarkan data agregat pelayanan kesehatan tahun 2025, estimasi total populasi ibu hamil yang menjadi sasaran layanan di Kabupaten Pasuruan tercatat sebanyak 24.368 ibu hamil. Angka ini merepresentasikan beban kerja riil yang harus ditangani oleh fasilitas kesehatan daerah dalam satu tahun anggaran.

Dari total populasi tersebut, upaya penapisan (*screening*) melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) berhasil mengidentifikasi adanya kelompok risiko spesifik, yakni Ibu Hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Tercatat sebanyak 1.864 ibu hamil terdiagnosis mengalami KEK. Jika dikalkulasi secara statistik, angka ini menunjukkan prevalensi KEK pada ibu hamil di Kabupaten Pasuruan berada di kisaran 7,65%. Angka prevalensi ini memberikan gambaran epidemiologis bahwa meskipun mayoritas ibu hamil dalam kondisi gizi baik, masih terdapat hampir 8% ibu hamil yang memulai atau menjalani kehamilannya dengan defisit energi kronis. Kelompok inilah yang menjadi "zona merah" atau penyumbang potensi stunting terbesar jika tidak dilakukan intervensi agresif.

Merespons temuan kasus tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan intervensi spesifik berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan. Kinerja distribusi PMT tercatat telah menjangkau 1.573 ibu hamil KEK. Secara persentase, cakupan penanganan ini mencapai angka 84,39% dari total kasus KEK yang ditemukan. Capaian di atas 80% ini mengindikasikan responsivitas sistem logistik dan kesiapan tenaga kesehatan yang cukup tinggi dalam menyalurkan bantuan gizi kepada sasaran prioritas.

Meskipun demikian, dalam perspektif *zero tolerance*, analisis teknokratik harus menyoroti adanya kesenjangan (*gap*) pelayanan sebesar kurang lebih 15,6% atau sekitar 291 ibu hamil KEK yang belum tercatat mendapatkan intervensi PMT secara optimal. Celah ini perlu ditelusuri akar masalahnya melalui audit kasus apakah disebabkan oleh faktor penolakan sasaran (*refusal*), hambatan distribusi geografis, atau kasus baru yang ditemukan pada akhir periode pelaporan sehingga intervensi masih dalam proses berjalan. Strategi *sweeping* dan pendampingan rumah tangga

wajib diintensifkan untuk memastikan 100% ibu hamil KEK mendapatkan asupan tambahan guna mendorong berat badan janin.

B. Kepatuhan Standar Pelayanan Antenatal (ANC) dan Suplementasi

Indikator kedua yang menjadi pilar utama keselamatan ibu dan bayi adalah kepatuhan terhadap standar pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC). Sesuai dengan transformasi layanan kesehatan primer, standar pemeriksaan kehamilan kini ditingkatkan menjadi minimal 6 kali tatap muka (K6), dengan rincian minimal dua kali pemeriksaan oleh dokter termasuk pemeriksaan USG.

Berdasarkan rekapitulasi kinerja layanan, jumlah ibu hamil yang telah menuntaskan pemeriksaan ANC sesuai standar minimal 6 kali tercatat sebanyak 19.962 ibu hamil. Jika disandingkan dengan total sasaran (24.368 bumil), maka capaian kinerja pelayanan ANC K6 di Kabupaten Pasuruan berada pada angka 81,92% (dibulatkan 82%). Capaian 82% ini merepresentasikan kinerja pelayanan kesehatan yang Solid dan Baik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil di Kabupaten Pasuruan memiliki kesadaran tinggi untuk memeriksakan kandungannya secara rutin, serta aksesibilitas fasilitas kesehatan (Puskesmas/Pustu) cukup merata dan terjangkau. Adapun sisa sekitar 18% sasaran yang belum tercatat K6 kemungkinan besar merupakan ibu hamil dengan usia kehamilan muda (Trimester I atau II) yang secara teknis memang belum waktunya mencapai kunjungan keenam pada saat data ditarik, atau ibu hamil yang melakukan mobilitas penduduk (pindah domisili).

Temuan yang sangat menarik dan patut diapresiasi muncul ketika menyandingkan data ANC dengan data pemberian Tablet Tambah Darah (TTD). Data menunjukkan angka yang identik dan presisi: jumlah ibu hamil yang mendapatkan TTD (minimal 90 tablet) juga tercatat sebanyak 19.962 ibu hamil.

Kesamaan absolut antara angka ANC K6 (19.962) dan Pemberian TTD (19.962) membuktikan bahwa strategi integrasi layanan (*bundled services*) telah berjalan sempurna di fasilitas kesehatan primer. Tidak ada dikotomi layanan. Setiap ibu hamil yang datang untuk menuntaskan pemeriksaan kehamilannya (ANC), secara otomatis dan sistematis langsung mendapatkan paket suplementasi TTD untuk mencegah anemia. Konvergensi layanan di titik fasilitas kesehatan (*point of care*) ini

merupakan praktik baik (*best practice*) manajemen program, karena meminimalisir peluang sasaran yang terlewat (*missed opportunity*). Dengan kepatuhan konsumsi TTD yang berbanding lurus dengan kunjungan ANC, risiko pendarahan saat persalinan dan risiko bayi lahir *stunting* akibat anemia ibu dapat direduksi secara signifikan.

Secara keseluruhan, analisis situasi pada klaster Ibu Hamil menunjukkan performa yang menggembirakan dengan cakupan layanan dasar di atas 80%. Fokus penguatan ke depan (Tahun 2026) harus diarahkan pada strategi penuntasan intervensi pada sisa 15% ibu hamil KEK dan memastikan kualitas pemeriksaan ANC tidak hanya sekadar kuantitas kunjungan, tetapi benar-benar mendeteksi penyulit sejak dini.

3.5. Analisis Capaian Ibu Nifas\

Periode pasca persalinan atau masa nifas (*puerperium*) merupakan fase transisi kritis yang berlangsung selama 42 hari setelah kelahiran. Dalam konteks strategi percepatan penurunan *stunting*, fase ini memiliki dualitas fungsi strategis: pertama, sebagai fase pemulihan fisiologis ibu dan inisiasi pemberian nutrisi terbaik bagi bayi (ASI Eksklusif); dan kedua, sebagai momentum emas untuk melakukan intervensi pengaturan jarak kelahiran (*birth spacing*) melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB). Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat (< 2 tahun) merupakan faktor risiko determinan yang dapat menyebabkan "depleksi nutrisi ibu", di mana cadangan gizi ibu belum pulih sepenuhnya namun sudah harus berbagi dengan janin baru, yang berujung pada risiko bayi lahir *stunting*. Oleh karena itu, analisis capaian pada klaster ini difokuskan pada cakupan layanan ibu nifas dan integrasinya dengan pelayanan KB Pasca Persalinan.

A. Beban Sasaran dan Jangkauan Layanan Nifas

Berdasarkan rekapitulasi data pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan primer dan rujukan sepanjang tahun 2025, tercatat jumlah total ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 17.577 ibu nifas. Angka ini merepresentasikan jumlah ibu bersalin yang berhasil dipantau kondisi kesehatannya oleh tenaga kesehatan (Bidan/Dokter) pada masa rentan pasca melahirkan.

Dari perspektif manajemen kesehatan masyarakat, angka 17.577 ini bukan sekadar statistik demografi, melainkan indikator beban kerja riil (*workload*) yang telah ditangani oleh sistem kesehatan daerah. Tingginya angka ibu nifas yang terlayani menunjukkan bahwa aksesibilitas fasilitas kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) sudah sangat baik. Pemantauan pada 17.577 ibu ini sangat krusial untuk memastikan keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan mencegah komplikasi pasca salin yang dapat menghambat proses pemberian ASI, yang notabene adalah "vaksin" alami pertama untuk mencegah stunting pada bayi baru lahir.

B. Kinerja Strategis Pelayanan KB Pasca Persalinan

Indikator keberhasilan yang paling menonjol pada fase ini adalah tingginya partisipasi ibu nifas dalam program Keluarga Berencana (KB). Data menunjukkan bahwa dari total populasi ibu nifas yang ada, sebanyak 14.930 ibu telah mendapatkan pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP).

Jika dilakukan analisis rasio antara jumlah peserta KB (14.930) dengan total populasi ibu nifas (17.577), maka diperoleh angka cakupan layanan (*coverage ratio*) sebesar 84,94% (atau dibulatkan 85%).

Capaian angka 85% ini memiliki bobot keberhasilan yang sangat signifikan secara teknokratik. Hal ini mengindikasikan tiga keberhasilan fundamental dalam sistem kesehatan Kabupaten Pasuruan:

1. Kesadaran Demografis yang Tinggi: Mayoritas ibu di Kabupaten Pasuruan (85 dari 100 ibu) memiliki kesadaran otonom untuk menunda atau mengatur kehamilan berikutnya. Hal ini sangat positif bagi upaya pencegahan stunting, karena memberikan waktu biologis yang cukup bagi rahim dan cadangan zat besi ibu untuk pulih sepenuhnya sebelum hamil kembali.
2. Integrasi Layanan yang Efektif: Tingginya angka ini membuktikan bahwa Bidan Desa dan petugas kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas berhasil melakukan edukasi kontrasepsi sejak fase kehamilan (Ante Natal Care) atau segera setelah persalinan. Ibu tidak dibiarkan pulang ke rumah tanpa perlindungan kontrasepsi.

3. Dukungan Suplai Alat Kontrasepsi: Ketersediaan alokon (alat obat kontrasepsi) di fasilitas kesehatan terjamin ketersediaannya sehingga mampu melayani permintaan 14.930 akseptor baru ini.

C. Analisis Celah Layanan (Gap Analysis)

Meskipun capaian 85% dikategorikan sangat baik (kategori Hijau/Prima), analisis situasi yang objektif tetap harus menyoroti adanya residu atau celah layanan (*service gap*) sebesar 15%. Terdapat selisih sekitar 2.647 ibu nifas yang tercatat belum atau tidak langsung mengakses layanan KB pasca persalinan.

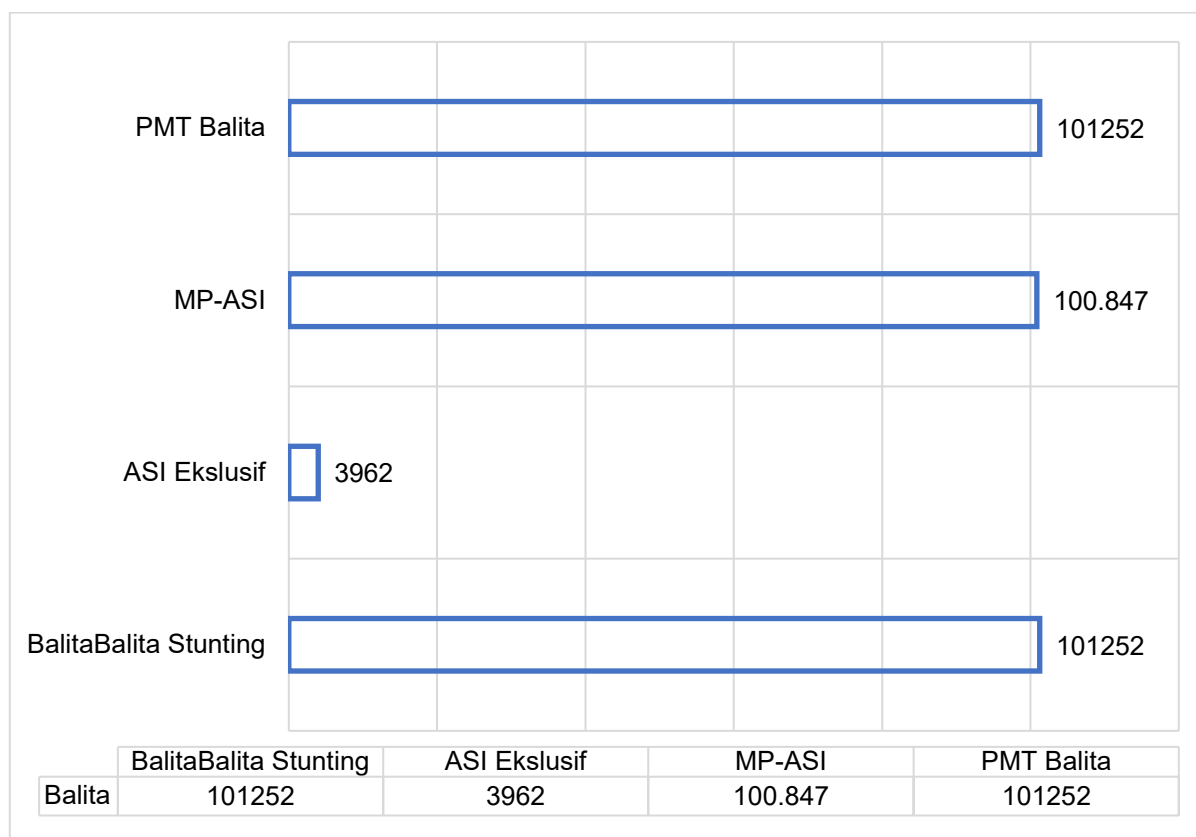
Kelompok 15% ini perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku. Ada kemungkinan penundaan ber-KB disebabkan oleh faktor budaya (menunggu selesai masa nifas 40 hari), alasan medis/kontraindikasi sementara, atau kurangnya dukungan dari suami/keluarga. Strategi *post-natal home care* atau kunjungan rumah nifas (KF) harus dioptimalkan untuk menjangkau kelompok ini, guna memastikan mereka tidak mengalami "kehamilan yang tidak diinginkan" (KTD) dalam waktu dekat, yang seringkali menjadi penyumbang kasus bayi stunting baru karena ketidaksiapan fisik dan ekonomi keluarga.

Secara keseluruhan, performa layanan pada fase ibu nifas di Kabupaten Pasuruan menunjukkan fondasi yang kokoh dalam mendukung strategi pencegahan stunting melalui pengendalian jarak kelahiran.

3.6. Analisis Capaian Balita

Analisis terhadap kelompok sasaran Balita (Bawah Lima Tahun) menempati hierarki tertinggi dalam struktur evaluasi kinerja percepatan penurunan *stunting*. Jika intervensi pada remaja, calon pengantin, dan ibu hamil diposisikan sebagai upaya preventif di sisi hulu, maka status gizi balita merupakan muara akhir (*ultimate outcome*) sekaligus indikator validitas dari efektivitas seluruh rangkaian intervensi tersebut. Kondisi fisik balita hari ini adalah manifestasi nyata dari akumulasi kualitas layanan kesehatan dan pengasuhan yang diterima selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan evaluasi komprehensif pada klaster ini dengan membedah dua dimensi

strategis: dimensi epidemiologis (prevalensi stunting aktual) dan dimensi kepatuhan layanan nutrisi (cakupan intervensi spesifik).



Gambar 3.8 Jumlah Capaian Balita

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

A. Validitas Data dan Fenomena Penurunan Prevalensi Stunting

Langkah pertama dalam menetapkan status keberhasilan daerah adalah memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan representasi populasi yang tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran serentak yang terintegrasi dalam sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), mesin birokrasi kesehatan Kabupaten Pasuruan berhasil melakukan pengukuran antropometri terhadap populasi balita yang sangat masif, yaitu sejumlah 101.252 balita.

Besaran partisipasi (D/S) yang mencapai angka ratusan ribu ini memberikan legitimasi statistik yang sangat kuat. Data ini bukan sekadar hasil *sampling* survei, melainkan gambaran sensus *by name by address* yang merekam kondisi riil di setiap

jengkal wilayah. Dari total populasi balita yang diukur tersebut, sistem mendeteksi jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek (*stunted*) hanya sebanyak 3.962 balita.

Jika dikonversi ke dalam indikator kinerja utama, angka ini menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* riil di Kabupaten Pasuruan telah menyentuh angka 3,91%.

Pencapaian angka 3,91% ini merupakan sebuah tonggak sejarah (*historical milestone*) dalam pembangunan kesehatan daerah. Secara teknokratik, angka ini mengandung tiga implikasi besar:

1. Melampaui Target Nasional: Kabupaten Pasuruan telah melompat jauh melampaui target RPJMN nasional yang mematok angka 14%. Posisi 3,91% menempatkan daerah ini setara dengan standar prevalensi di negara-negara maju yang memiliki sistem jaminan kesehatan mapan.
2. Efektivitas Konvergensi: Rendahnya angka ini membuktikan bahwa "tembok pertahanan" pencegahan stunting yang dibangun dari hulu (Catin, Bumil) telah berfungsi optimal, sehingga aliran kasus baru (*new entry cases*) berhasil dibendung seminimal mungkin.
3. Bonus Demografi Berkualitas: Dengan 96% lebih balita tumbuh normal, Kabupaten Pasuruan telah mengamankan aset sumber daya manusia masa depan yang kompetitif dan bebas dari hambatan kognitif akibat kurang gizi.

B. Universal Coverage pada Intervensi Nutrisi Utama (ASI & MP-ASI)

Rendahnya angka stunting (3,91%) bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil kausalitas langsung dari kesempurnaan implementasi intervensi di tingkat masyarakat. Data kinerja layanan menunjukkan fenomena *Universal Coverage* atau cakupan semesta pada indikator pemberian makan bayi dan anak.

Pada indikator Pemberian ASI Eksklusif, tercatat capaian kinerja yang sempurna, yakni 100%. Angka absolut ini mengindikasikan keberhasilan rekayasa sosial dan promosi kesehatan yang luar biasa. Seluruh bayi usia 0-6 bulan yang terpantau di wilayah kerja Puskesmas dipastikan mendapatkan hak biologisnya berupa ASI tanpa kontaminasi makanan lain. Keberhasilan 100% ini menjadi fondasi

imunitas (*immune foundation*) yang kokoh, memutus risiko infeksi berulang seperti diare dan ISPA yang kerap menjadi pemicu utama gagal tumbuh (*weight faltering*) pada bayi muda.

Konsistensi layanan ini berlanjut pada fase kritis berikutnya, yaitu periode transisi nutrisi usia 6-23 bulan. Capaian indikator Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mencatatkan angka yang sangat impresif, yaitu 99,6%. Nyaris seluruh balita di fase ini telah mendapatkan asupan nutrisi padat yang adekuat dari segi tekstur, frekuensi, dan keragaman pangan. Residu data yang sangat kecil (0,4%) dapat diabaikan sebagai varians data harian. Tingginya angka kepatuhan MP-ASI ini menjadi bukti empiris bahwa ketahanan pangan di tingkat rumah tangga terjaga dengan baik, serta literasi gizi ibu balita telah terinternalisasi menjadi perilaku pengasuhan yang positif.

C. Mekanisme Perlindungan Kuratif: Intervensi PMT Pemulihan

Ketangguhan sebuah sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuannya mencegah, tetapi juga dari responsivitasnya dalam menangani kasus yang terlanjur terjadi (*curative action*). Terhadap balita yang teridentifikasi mengalami masalah gizi akut (Gizi Kurang, Gizi Buruk, atau *Underweight*), Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan kebijakan "Zero Rejection" atau toleransi nol terhadap penelantaran kasus.

Komitmen politik anggaran ini terbukti dari capaian indikator Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita yang juga mencapai angka sempurna 100%.

Makna di balik angka 100% ini sangat dalam. Ini berarti seluruh balita sasaran yang berhak mendapatkan bantuan intervensi gizi pemulihan, telah terlayani sepenuhnya tanpa terkecuali. Tidak ada hambatan birokrasi, ketiadaan anggaran, ataupun kendala logistik yang menyebabkan balita gizi kurang tidak tertangani. Keberhasilan mencapai cakupan 100% pada PMT ini merupakan indikator efisiensi manajemen rantai pasok Dinas Kesehatan dan optimalisasi penggunaan Dana Desa/BOK. Ketika intervensi PMT diberikan 100% tepat sasaran dan tepat waktu, maka peluang balita kurus (*wasting*) untuk memburuk menjadi pendek (*stunting*) dapat dipotong seketika.

Kesimpulannya, sinergi antara pencegahan primer yang optimal (ASI & MP-ASI ~100%) dan jaring pengaman kuratif yang tuntas (PMT 100%) adalah kunci jawaban rasional mengapa Kabupaten Pasuruan berhasil menekan prevalensi stunting hingga ke titik terendah 3,91%. Sistem ini telah berjalan dalam koridor *High Reliability Organization* (HRO) di sektor kesehatan.

BAB IV

ANALISIS DUKUNGAN ANGGARAN DAN KEWILAYAHAN

Akselerasi penurunan prevalensi *stunting* di daerah tidak cukup hanya bermodalkan regulasi di atas kertas. Ia menuntut adanya "darah" segar berupa dukungan fiskal yang nyata untuk menggerakkan mesin birokrasi dan intervensi lapangan. Bab ini didedikasikan untuk membedah postur dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*. Analisis ini bertujuan untuk membuktikan apakah alokasi sumber daya finansial daerah (APBD) telah memenuhi prinsip *Money Follows Program* dan apakah distribusi anggarannya telah mencerminkan kebutuhan riil berdasarkan analisis determinan masalah.

4.1. Anggaran Percepatan Penurunan Stunting

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah instrumen kebijakan yang paling jujur dalam mencerminkan prioritas politik pemerintah daerah. Dalam konteks penanganan *stunting* Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmen fiskal yang progresif. Melalui mekanisme *tagging* anggaran tematik *stunting*, teridentifikasi bahwa intervensi tidak lagi dimonopoli oleh sektor kesehatan semata, melainkan terdistribusi dalam skema konvergensi yang matang.

Berdasarkan data rekapitulasi realisasi dukungan anggaran semester II tahun 2025, total alokasi dana yang digelontorkan secara spesifik untuk program percepatan penurunan *stunting* mencapai angka Rp 7.147.236.000 (Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Tabel 4.1 Alokasi Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Stunting

No	Perangkat Daerah (OPD)	Alokasi Anggaran (Rp)	Fokus Pemanfaatan
1	Dinas Kesehatan	Rp 3.209.646.000	PMT Lokal Bumil/Balita & Alkes Posyandu
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 2.907.590.000	Pengelolaan Persampahan & Sanitasi Kumuh

No	Perangkat Daerah (OPD)	Alokasi Anggaran (Rp)	Fokus Pemanfaatan
3	Dinas Sosial	Rp 365.000.000	Jaminan Sosial Keluarga 1000 HPK
4	Dinas P3AP2KB	Rp 340.000.000	KIE KB dan Bangga Kencana
5	Dinas SDA, Cipta Karya & TR	Rp 278.500.000	Penyediaan Air Minum (SPAM)
6	Dinas Peternakan & Keswan	Rp 46.500.000	Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pangan ASUH)
-	TOTAL	Rp 7.147.236.000	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Angka Rp 7,1 Miliar ini merepresentasikan "ruang fiskal" (*fiscal space*) yang sengaja disediakan oleh Pemerintah Daerah di tengah keterbatasan anggaran lainnya. Besaran angka ini menjadi indikator kuat bahwa penanganan *stunting* ditempatkan sebagai program prioritas daerah (*super priority*). Dana stimulus ini dikelola secara terpadu oleh 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, membentuk sebuah ekosistem penanganan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.

Salah satu temuan paling menarik dan positif dari analisis postur anggaran tahun ini adalah terjadinya transformasi paradigma intervensi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya anggaran *stunting* umumnya didominasi secara mutlak (80-90%) oleh Dinas Kesehatan, maka pada tahun 2025 ini terlihat adanya keseimbangan proporsional (*equilibrium*) antara intervensi medis (spesifik) dan intervensi lingkungan (sensitif). Hal ini tercermin dari distribusi dua pos anggaran terbesar:

1. Dinas Kesehatan sebagai pengampu Intervensi Spesifik mengelola Rp 3.209.646.000 ($\pm 45\%$ dari total pagu).
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengampu Intervensi Sensitif mengelola Rp 2.907.590.000 ($\pm 40\%$ dari total pagu).

Tingginya alokasi anggaran di Dinas Lingkungan Hidup yang nyaris menyamai anggaran Dinas Kesehatan adalah bukti kecerdasan perencanaan teknokratik.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari sepenuhnya bahwa *stunting* tidak hanya diselesaikan dengan tablet tambah darah atau biskuit, tetapi harus diselesaikan dengan membenahi sanitasi lingkungan. Investasi hampir Rp 3 Miliar di DLH difokuskan pada Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi Kumuh. Strategi ini secara langsung memutus mata rantai infeksi berulang (*environmental enteropathy*) pada balita yang seringkali menjadi penyebab utama gagal tumbuh meskipun asupan makanannya sudah baik.

Selain dua dinas besar di atas, analisis mendalam terhadap alokasi OPD lainnya menunjukkan peran taktis yang saling melengkapi:

- Penyelamatan Gizi Akut (Dinas Kesehatan): Dengan anggaran Rp 3,2 Miliar, Dinas Kesehatan memegang peran krusial dalam "operasi penyelamatan". Fokus pemanfaatan anggaran diarahkan secara spesifik pada penyediaan PMT Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita serta pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Posyandu. Alokasi ini sangat strategis karena menjamin ketersediaan logistik pangan bagi kelompok risiko tinggi (KEK/Gizi Kurang) dan memastikan validitas alat ukur antropometri untuk menghasilkan data E-PPGBM yang akurat.
- Jaring Pengaman Sosial (Dinas Sosial): Alokasi sebesar Rp 365.000.000 pada Dinas Sosial difungsikan sebagai bantalan ekonomi melalui program Jaminan Sosial Keluarga 1000 HPK. Ini adalah bentuk intervensi sensitif berbasis ekonomi, memastikan bahwa keluarga dengan balita *stunting* atau ibu hamil tidak jatuh dalam kerawanan pangan akibat ketidakmampuan daya beli.
- Rekayasa Sosial dan Perubahan Perilaku (Dinas P3AP2KB): Dengan anggaran Rp 340.000.000, dinas ini mengemban tugas "perang pemikiran". Dana ini digunakan untuk KIE KB dan Bangga Kencana, menggerakkan ribuan kader TPK di lapangan untuk mengubah *mindset* masyarakat tentang pola asuh, pencegahan pernikahan dini, dan pengaturan jarak kelahiran.
- Infrastruktur Dasar (Dinas SDA, Cipta Karya & TR): Dukungan sebesar Rp 278.500.000 dialokasikan untuk Penyediaan Air Minum (SPAM). Meskipun terlihat lebih kecil dibanding DLH, pos ini sangat vital untuk menjamin

ketersediaan air bersih yang layak konsumsi, yang merupakan syarat mutlak untuk melarutkan susu formula atau MP-ASI agar bebas bakteri.

- Keamanan Pangan (Dinas Peternakan & Keswan): Alokasi sebesar Rp 46.500.000 difokuskan pada Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pangan ASUH). Ini adalah benteng pertahanan untuk memastikan protein hewani (telur, daging, susu) yang dikonsumsi masyarakat aman, sehat, utuh, dan halal, serta bebas dari penyakit zoonosis.

Jika ditinjau dari perspektif efisiensi anggaran (*Value for Money*), alokasi Rp 7,1 Miliar ini terbukti memiliki daya ungkit (*leverage*) yang sangat tinggi.

Indikator keberhasilannya sangat jelas: dengan input anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil menekan prevalensi *stunting* hingga ke angka ekstrem 3,91%. Ini berarti, setiap satu rupiah anggaran yang dibelanjakan telah efektif dikonversi menjadi perbaikan status gizi balita. Tidak ada inefisiensi atau pemborosan program yang tidak perlu. Model penganggaran yang memadukan intervensi fisik masif (Sanitasi/DLH) dan intervensi gizi langsung (PMT/Dinkes) terbukti menjadi formula ampuh yang patut dipertahankan dan direplikasi pada tahun anggaran berikutnya.

4.2. Analisis Kewilayahan dan Penetapan Lokus Prioritas Tahun 2026

Sebuah kebijakan publik yang efektif tidak hanya ditentukan oleh pertanyaan "apa" intervensi yang dilakukan, melainkan juga "di mana" intervensi tersebut didaratkan. Dalam konteks penanganan *stunting* yang merupakan permasalahan multidimensi, analisis situasi tidak akan lengkap tanpa membedah dimensi spasial atau kewilayahan secara mendalam. Pemetaan secara geospasial menjadi instrumen teknokratik yang paling vital bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menghindari jebakan pola penanganan yang bersifat generalis atau "hantam rata" (*one size fits all*). Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran daerah (*fiscal space*) dan perlunya efektivitas daya ungkit (*leverage*) program, strategi penanganan harus diarahkan secara asimetris. Artinya, sumber daya pembangunan harus didistribusikan secara proporsional berdasarkan derajat keparahan beban masalah (*burden of disease*) di masing-masing wilayah. Pendekatan inilah yang mendasari penetapan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Stunting.

A. Metodologi dan Urgensi Penetapan Lokus

Penetapan wilayah prioritas di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada analisis berjenjang yang memadukan indikator epidemiologis (kesehatan) dan kapasitas suplai daerah. Sesuai dengan mandat Strategi Nasional, penentuan lokus ini sejatinya menggunakan metode pembobotan (*scoring*) yang ketat, mengintegrasikan variabel prevalensi (persentase kejadian) dan variabel jumlah kasus absolut (jumlah riil balita *stunting*). Logika teknokratik di balik metode ini adalah untuk memastikan wilayah yang terpilih memenuhi dua kriteria: memiliki tingkat kejadian tinggi (prevalensi) dan memiliki dampak besar terhadap penurunan agregat kabupaten jika ditangani (jumlah kasus).

Dalam penyusunan analisis situasi periode ini, harus diakui terdapat tantangan administratif terkait ketersediaan data mikro. Rincian data kuantitatif mengenai angka prevalensi spesifik dan jumlah kasus absolut per kecamatan untuk tahun berjalan belum dapat disajikan secara terperinci dalam dokumen ini karena kendala integrasi data sektoral. Ketiadaan data mikro per kecamatan ini menjadi catatan evaluasi kritis bagi perbaikan sistem manajemen data satu pintu di masa mendatang. Meskipun demikian, hasil akhir (output) dari proses analisis teknokratik tersebut telah terformalisasi secara hukum. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, telah menetapkan daftar definitif Lokasi Fokus Intervensi Stunting Tahun 2026. Daftar ini menjadi "peta navigasi" sah yang mengikat seluruh Perangkat Daerah untuk mengarahkan programnya ke titik koordinat yang telah ditentukan.

B. Peta Sebaran dan Analisis Klasterisasi Wilayah

Berdasarkan hasil pemetaan risiko yang komprehensif sebagaimana tertuang dalam lampiran data kewilayahan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan 25 desa yang tersebar di 8 kecamatan sebagai medan pertempuran utama melawan stunting pada tahun 2026. Jika ditelaah lebih dalam, distribusi desa lokus ini tidak menyebar secara acak (*random distribution*), melainkan membentuk pola klasterisasi yang sangat kuat. Pola ini memberikan sinyal penting mengenai karakteristik masalah di setiap wilayah. Berikut adalah analisis mendalam mengenai klasterisasi wilayah prioritas tersebut:

1. Kecamatan Kraton: Episentrum Masalah (Zona Merah)

Analisis kewilayahan secara tegas menempatkan Kecamatan Kraton sebagai "episentrum" atau wilayah dengan densitas masalah tertinggi. Fakta statistik menunjukkan bahwa dari total 25 desa lokus se-Kabupaten Pasuruan, sebanyak 7 desa atau setara dengan 28% dari total lokus berada di wilayah administratif Kecamatan Kraton. Desa-desa tersebut meliputi Desa Tambaksari, Desa Klampisrejo, Desa Slamprit, Desa Mulyorejo, Desa Jeruk, Desa Karanganyar, dan Desa Curahdukuh.

Tingginya konsentrasi desa lokus di satu kecamatan ini mengindikasikan bahwa permasalahan stunting di Kecamatan Kraton bersifat sistemik dan masif, bukan sekadar kasus sporadis. Ada kemungkinan faktor determinan lingkungan (seperti sanitasi buruk di wilayah pesisir/dataran rendah) atau faktor sosial-ekonomi yang merata mempengaruhi hampir seluruh wilayah kecamatan ini. Implikasinya, intervensi di Kraton tidak bisa dilakukan secara parsial desa per desa. Diperlukan pendekatan berbasis kawasan (*kecamatan-wide approach*)

2. Klaster Penyangga Utama: Kecamatan Wonorejo dan Grati

Klaster kedua dengan intensitas masalah yang signifikan berada di Kecamatan Wonorejo dan Kecamatan Grati. Masing-masing kecamatan ini menyumbang 4 desa lokus, menjadikan mereka sebagai wilayah prioritas tingkat dua.

1) Di Kecamatan Wonorejo, fokus intervensi harus diarahkan pada Desa Karang Asem, Desa Karangjati, Desa Kluwut, dan Desa Karangmenggah. Konsentrasi 4 desa ini menunjukkan adanya "kantong" masalah yang cukup luas di wilayah Wonorejo.

2) Di Kecamatan Grati, desa prioritas meliputi Desa Rebalas, Desa Plososari, Desa Sumber Dawesari, dan Desa Sumberagung. Grati sebagai wilayah yang memiliki karakteristik unik (peralihan industri dan pertanian) memerlukan analisis determinan yang spesifik, apakah stunting di sini dipicu oleh pola asuh ibu bekerja atau faktor ketersediaan air bersih.

3. Klaster Wilayah Pedesaan/Pegunungan: Winongan, Pasrepan, dan Puspo

Klaster berikutnya terdiri dari kecamatan dengan jumlah desa lokus berkisar antara 2 hingga 3 desa.

- 1) Kecamatan Winongan memiliki 3 desa lokus: Karangtengah, Jaladri, dan Sumberejo.
 - 2) Kecamatan Pasrepan juga memiliki 3 desa lokus: Petung, Lemahbang, dan Mangguan.
 - 3) Kecamatan Puspo memiliki 2 desa lokus: Pusung Malang dan Palangsari.
4. Klaster Kasuistik/Terlokalisir: Bangil dan Kejayan
- Terakhir, terdapat pola menarik pada dua kecamatan yang masing-masing hanya memiliki 1 desa lokus, yaitu Kecamatan Bangil (Desa Masangan) dan Kecamatan Kejayan (Desa Kurung). Keberadaan hanya satu desa lokus di Kecamatan Bangil yang notabene adalah ibu kota dan pusat aktivitas ekonomi mengindikasikan fenomena urban stunting yang bersifat pocketing (terlokalisir). Stunting di Bangil kemungkinan besar bukan karena kemiskinan wilayah secara umum, melainkan terkonsentrasi di satu titik kumuh perkotaan atau komunitas spesifik di Desa Masangan. Strategi di sini harus sangat presisi alias "operasi bedah", fokus pada keluarga sasaran di desa tersebut tanpa perlu memobilisasi sumber daya satu kecamatan penuh.

Tabel 4.2 Sebaran Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa Prioritas (Lokus)
1	Kraton	7 Desa	1. Tambaksari 2. Klampisrejo 3. Slambrit 4. Mulyorejo 5. Jeruk 6. Karanganyar 7. Curahdukuh
2	Wonorejo	4 Desa	1. Karang Asem 2. Karangjatianyar 3. Kluwut 4. Karangmenggah
3	Grati	4 Desa	1. Rebalas 2. Plososari

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa Prioritas (Lokus)
			3. Sumber Dawesari 4. Sumberagung
4	Winongan	3 Desa	1. Karangtengah 2. Jaladri 3. Sumberejo
5	Pasrepan	3 Desa	1. Petung 2. Lemahbang 3. Mangguan
6	Puspo	2 Desa	1. Pusung Malang 2. Palangsari
7	Bangil	1 Desa	1. Masangan
8	Kejayan	1 Desa	1. Kurung

Sumber: SK Bupati Pasuruan tentang Penetapan Locus Stunting Tahun 2026

C. Implikasi Strategis dan Arah Kebijakan Anggaran

Penetapan peta lokus 25 desa di 8 kecamatan ini membawa konsekuensi logis terhadap manajemen pembangunan dan politik anggaran daerah. Dokumen analisis situasi ini merekomendasikan adanya Refocusing Program dan Anggaran Tahun 2026 secara radikal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perikanan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menjadikan daftar desa lokus ini sebagai menu wajib dalam Rencana Kerja (Renja) mereka.

Secara taktis, keberhasilan penanganan di 25 desa ini adalah kunci kemenangan Kabupaten Pasuruan. Jika diasumsikan bahwa desa-desa lokus ini adalah penyumbang jumlah kasus terbesar, maka penurunan prevalensi di 25 titik ini akan secara otomatis menarik turun angka agregat kabupaten secara signifikan. Oleh karena itu, mekanisme *reward and punishment* perlu diterapkan bagi Camat dan Kepala Desa di lokasi-lokasi tersebut untuk memastikan konvergensi program benar-benar sampai ke mulut balita (intervensi gizi) dan ke lingkungan rumah tangga (sanitasi).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data kinerja layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta evaluasi dukungan anggaran pada Tahun 2025, dapat ditarik beberapa simpulan strategis dan rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan.

5.1. Kesimpulan

1. **Capaian Monumental Penurunan Prevalensi (3,91%)** Kabupaten Pasuruan telah berhasil mencatatkan prestasi historis dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. Berdasarkan pengukuran sensus E-PPGBM terhadap 101.252 balita (populasi riil), prevalensi stunting berhasil ditekan hingga ke angka 3,91%. Angka ini jauh melampaui target nasional RPJMN (14%) dan menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah dengan status "Sangat Baik" dalam perlindungan SDM masa depan. Rendahnya angka ini adalah validasi empiris bahwa strategi konvergensi yang diterapkan telah berjalan efektif.
2. **Keberhasilan Operasional "Zero Missed Opportunity"** Kinerja layanan kesehatan pada seluruh siklus hidup menunjukkan performa prima. Pada fase hulu, terjadi agresivitas layanan luar biasa di mana pendampingan Calon Pengantin dan Skrining Kesehatan mencapai 135% dari target registrasi, membuktikan keaktifan TPK dalam menjemput bola. Pada fase hilir, layanan terhadap Balita mencapai titik kesempurnaan (Universal Coverage) dengan cakupan ASI Eksklusif, MP-ASI, dan PMT Pemulihan mencapai angka 99% - 100%. Sistem kesehatan daerah telah berhasil menerapkan standar toleransi nol (zero tolerance) terhadap risiko gizi.
3. **Efisiensi dan Transformasi Struktur Anggaran** Dukungan anggaran sebesar Rp 7,14 Miliar terbukti memiliki daya ungkit (leverage) tinggi dalam menurunkan stunting. Terjadi transformasi pola penganggaran yang cerdas, ditandai dengan keseimbangan proporsional antara anggaran Dinas Kesehatan (45%) dan Dinas Lingkungan Hidup (40%). Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah sukses menggeser paradigma

penanganan stunting dari sekadar "urusan medis" menjadi "urusan kesehatan lingkungan dan sanitasi" yang terintegrasi.

4. **Integrasi Layanan yang Solid (Bundled Services)** Analisis data menunjukkan adanya sinkronisasi sempurna antar-indikator. Kesamaan angka absolut antara kunjungan ANC Ibu Hamil dengan konsumsi TTD (19.962 sasaran) serta tingginya konversi ibu nifas menjadi akseptor KB (85%), menegaskan bahwa sistem integrasi layanan di fasilitas kesehatan primer berjalan tanpa cela. Tidak ada sasaran yang "lolos" tanpa mendapatkan paket layanan lengkap.

5.2. Rekomendasi

Meskipun capaian kinerja tahun 2025 sangat memuaskan, kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus kembali (*rebound stunting*) harus tetap dijaga. Untuk Tahun Anggaran 2026, direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Strategi Pemeliharaan ("Maintaining the Low")** Mengingat prevalensi sudah sangat rendah (3,91%), fokus strategi tahun 2026 harus bergeser dari "Penurunan Masif" menjadi "Pemeliharaan Ketat". Pengawasan harus difokuskan pada kasus baru (new entries), khususnya pada bayi usia 0-6 bulan dan 6-12 bulan. Setiap satu kasus balita stunting baru yang muncul harus diaudit secara medis (Audit Kasus Stunting) untuk mengetahui penyebab spesifiknya, apakah karena faktor penyakit infeksi atau pola asuh.
2. **Penuntasan Residu Kesenjangan pada Ibu Hamil KEK** Analisis Bab III menunjukkan masih adanya celah layanan (gap) sekitar 15% pada penanganan Ibu Hamil KEK dan sekitar 30% pada skrining anemia remaja putri. Disarankan untuk mengintensifkan strategi "Sweeping Berbasis Wilayah" pada kantong-kantong sasaran yang sulit dijangkau, serta memastikan logistik PMT Pemulihan tersedia buffer stock-nya di tingkat desa/Pustu untuk mengantisipasi kasus baru di pertengahan tahun berjalan.
3. **Penguatan Intervensi Sensitif Berbasis Lingkungan Berkelanjutan** Mengingat besarnya kontribusi sanitasi terhadap pencegahan stunting, alokasi anggaran signifikan pada Dinas Lingkungan Hidup (Sanitasi & Persampahan) WAJIB DIPERTAHANKAN atau ditingkatkan pada tahun 2026. Fokus harus diarahkan pada desa-desa lokus prioritas (seperti di Kec. Kraton, Wonorejo,

Grati) yang secara historis memiliki beban masalah sanitasi dasar. Infrastruktur air bersih dan jamban sehat harus tuntas di lokasi-lokasi tersebut.

4. **Sinkronisasi Basis Data Lintas Sektor (Interoperabilitas)** Untuk mengatasi anomali data administratif (seperti jumlah Catin yang diperiksa melebihi jumlah Catin terdaftar), diperlukan rekonsiliasi data rutin antara Kemenag (Simkah), Dinkes (E-Kohort/E-PPGBM), dan DP3AP2KB (Elsimil). Disarankan membentuk Satu Data Stunting Daerah yang diperbarui setiap triwulan (Bulan Timbang) sebagai rujukan tunggal perencanaan program.
5. **Penguatan Literasi Gizi Calon Pengantin Pria** Selama ini intervensi sangat berat dititikberatkan pada wanita (Rematri, Bumil). Ke depan, pelibatan laki-laki (Calon Pengantin Pria/Suami) dalam sesi edukasi dan konseling gizi harus ditingkatkan. Peran suami sangat vital dalam mendukung keputusan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif dan menyediakan pangan bergizi di rumah tangga.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.